LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkip Wawancara

Keterangan:
Peneliti disingkat dengan (P)
Narasumber disingkat dengan (N)

Nama : Maulvi Dimas Anugerah
Ket : Koordinator Kabupaten PKH Banjarnegara
Tempat : DINSOSPPPA Banjarnegara
Hari/tgl : Rabu, 25 Januari 2023

P : "Jadi saya ingin tahu apa saja jenis bansos yang dananya bersumber dari pemerintah pusat Kemensos dan pemerintah daerah atau APBD?"
N : "Mulai dari tahun berapa?"
P : "Tahun 2015."
N : "Bansos yang secara regular (tetap) didistribusikan oleh Kemensos adalah Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2014, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang 2019 berubah nama menjadi Sembako ini hanya berubah namanya dulu sebetulnya namanya raskin. Kemudian dari pusat selain itu ada Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) , dan Program Indonesia Pintar (PIP)."
P : "Kalo dari pemerintah daerah ada apa saja?"
N : "Bansos yang dikelola oleh daerah ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BLT-Covid."
P : "BLT dari kabupaten itu itens diberikan setiap berapa bulan atau ketika ada persitiwa aja kaya BLT Covid itu kan karena ada musibah covid ya?"
N : "Kalau sebelumnya itu ada tapi kalau tidak salah enam bulan sekali, setelah covid itu lumayan kenceng si jadi per 3 bulan sekali."
P : "Sampai sekarang apa masih berjalan bantuannya?"
N : "BLT masih, tetapi itu pun dari pemerintah pusat. Jadi BLT ada dari pusat dan daerah juga, sasaran penerima untuk bansos daerah ditujukan bagi yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat. BLT itu juga ada yang dari provinsi, sama-sama BLT Provinsi sasarannya yang belum menerima PKH dan pusat."
P : "Yang mendistribusikan semua bansos ini apa dari satu bidang PKH saja?"
N : "Engga, jadi bidang PKH khusus membantu penyaluran program bantuan PKH selain itu engga."
P : "Terus yang membantu penyaluran selama ini siapa?"
N : "Kalo BPNT itu peraturannya berubah-rubah dulu awal PKH dan TKSK, kemudian TKSK aja dan ditahun kemarin berubah lagi hanya

pendamping sosial yang menangani tapi sampai sekarang belum ditunjuk siapa yang menjadi pendamping sosial."

P : "TKSK itu apa?"

N : "Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, itu disetiap kecamatan ada."

P : "Untuk memfilter penerima bansos ini kan lumayan sulit karena jenisnya banyak ya, apakah mungkin satu penerima bansos menerima bantuan double?"

N : "Sangat berkemungkinan setiap penerima memperoleh lebih dari satu jenis bansos, tapi secara ideal penyaluran jenis BLT provinsi, BLT kabupaten, dan BLT-DD dicari dari orang-orang yang sudah terdaftar dalam DTKS namun belum menerima bansos PKH dan sembako. DTKS merupakan induk data yang memuat informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), sekarang yang mengelola Kemensos. Nanti BLT Desa juga diambil dari itu."

P : "Alurnya bagaimana sampai penerima masuk ke base data DTKS?"

N : "Alurnya itu dari pengusulan daerah, nah untuk mendapatkan data pengusulan itu biasanya desa melakukan musdes hanya mengusulkan ya tetapi yang memutuskan menerima atau itu tidak pemerintah pusat."

: "Proses uji layak bagi calon penerima bansos mesti melalui penyaringan di berbagai level, pertama masyarakat dapat mengusulkan diri ataupun diusulkan dari inisiatif orang lain di level RT, kemudian usulan tersebut diajukan dan dibahas bersama di musyawarah desa (musdes) desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat desa. Setelah mencapai kesepakatan musyawarah pemdes akan merangkum nama-nama warga desa yang layak untuk diusulkan menerima bansos, dan kemudian didaftarkan oleh perangkat melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Lalu, nama yang telah diusulkan via sistem akan disetujui dari DINSOSPPA, setelah di approved data akan di seleksi oleh Kemensos sekaligus keputusan akhir layak atau tidaknya nama yang diusulkan menjadi bagian dari DTKS. Selanjutnya penerima bansos disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jadi ya pemerintah pusat menyalurkan bantuan kepada KPM berdasar dari rujukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)."

P : "Final penentuan ya, sebelum final itu apakah ada verifikasi dari daerah khususnya DINSOS?"

N : "Verifikasinya itu ketika musdes saja karena diyakini orang-orang yang melaksanakan musyawarah sudah paham betul latar belakang ekonomi dan sosial calon penerima. Kan melibatkan RT-RW, perangkat desa, tenaga sosial dan diproses itu dibahas bersama tiap tokoh memberi pandangan."

P : "Apa bukti foto secara lengkap ada disitu?"

N : "Saya kurang paham karena itu pendamping kecamatan yang biasanya turun, tapi yang pasti orang-orang disana paham akan kondisi sebenarnya dari calon penerima ini."

P : “Nah untuk pendamping PKH itu sendiri yang sering menghadapi KPM dan paham betul kondisinya apakah bisa menghapus KPM dari DTKS bila dirasa sudah tidak memenuhi komponen?”

N : “Ini konteksnya tahun berapa kalo misalkan tahun ini kami memang diberi kewenangan untuk memberi kelayakan tapi belum ada surat resmi jadi kami belum berani. Tapi ditahun-tahun sebelumnya kami hanya bisa melakukan verifikasi terkait KPM PKH saja. Kalau prosesnya dulu lewat aplikasi, pendamping melakukan uji kelayakan dengan mengumpulkan data dukung seperti foto, data aset dan wawancara. Laporan ketidaklayakan akan diunggah melalui aplikasi untuk menunggu persetujuan koordinator wilayah. Pada penyaluran berikutnya sudah otomatis terhapus dari sistem dan tidak mendapat penyaluran bansos seperti sediakala.”

P : “Data dukungnya itu seperti apa saja?”

N : “Data dukung itu meliputi data asset, foto, terus pekerjaan pendapatan dsb. Terus terkait asset itu kita juga koordinasikan dengan desa untuk memastikan kepemilikan asset warga tersebut. Tapi namanya ketidaklayakan itu ada dua jenis, non-eligibel alami dan non-eligibel mampu. Alami itu bila warga tidak lagi memiliki komponen/syarat penerima PKH ya sudah nanti keluar dari peserta. Kalo yang eligible mampu itu karena biasanya memiliki asset, punya kekayaan yang dianggap pendamping mampu. Tamabahan satu lagi itu graduasi mandiri, ini yang ekonominya meningkat dengan usaha yang ada dan ini menjadi target prestasi pendamping PKH.”

P : “Seberapa sering agenda verifikasi dan validasi data penerima dilakukan, dan apakah pengaruh pemerintah desa besar dalam pembaharuan data penerima?”

N : “Verval (verifikasi dan validasi data) sebelum covid dilakukan ketika ada data yang diturunkan dari Kemensos, turun ke lapangan berdasar acuan data tersebut saja untuk kemudian divalidasi apakah penerima masih memiliki komponen syarat PKH atau tidak. Untuk bansos jenis PKH paling tidak dilakukan verval satu tahun sekali sejak 2014 atau tergantung kuota peserta (kalau ada penambahan kuota). Jadi besar kemungkinan bansos ini tepat sasaran.”

P : “Bantuan dari pemerintah pusat selain PKH itu apakah ada pengawasan juga dan seberapa sering?”

N : “Kalo BPNT kita tidak tahu, tapi sebetulnya ada pihak yang membantu mengawasi dari DINSOSPPA atau APH yang bekerjasama dengan Kemensos. Tetapi untuk jenis bansos sembako sepertinya tidak ada verval jadi kalo ada data turun ya sudah menerima.”

P : “Penghapusan nama penerima BPNT apakah bisa seperti halnya PKH?”

N : “Penghapusan bisa tapi dari pengusulan desa”

P : “Jadi, berkemungkinan apabila KPM sudah mandiri/mampu secara ekonomi tetapi tidak dilaporkan untuk dihapus maka dia akan tetap menerima?”

N : “Diluar bansos PKH iya, karena sampai saat ini diluar jenis PKH pembaharuan data bergantung pada aktif tidaknya pemerintah desa. Sejauh ini kalau penerima belum meninggal dunia maka tidak ada pengusulan penghapusan nama. Tetapi siapa-siapa penerima bansos sembako tidak seluruhnya tetap, ada yang sebagian tetap ada yang sebagian lain berubah-ubah penerimanya yang menentukan pusat mengambil dari DTKS. DTKS harus sinkron dengan data Disdukcapil, bisa jadi data yang tidak valid dengan Disdukcapil menjadi faktor nama-nama penerima di DTKS yang sebelumnya ada menjadi tercoret oleh sistem. Yang bersangkutan tidak memaintance data kependudukan mereka menjadi faktor utama data DTKS tidak aktif, data DTKS yang tidak aktif otomatis tidak menerima penyaluran bansos.”

P : “Sebetulnya penerima PKH itu berkemungkinan atau boleh tidak menerima BPNT atau jenis bantuan yang lain?”

N : “Sejatinya penerima PKH itu menerima bantuan jenis lain, tetapi karena koordinasi tidak sinkron menjadi satu di bawah naungan bidang PKH saja ibarantnya beda kamar maka seringnya penerima PKH tidak menerima bantuan yang lain. Setiap ada penyaluran pemdes misalnya memiliki kebijakan sendiri, contohnya ternyata BLT-DD menetapkan kebijakan penerima PKH tidak diperbolehkan menerima jenis bansos dari desa maka KPM PKH tidak berhak.”

P : “Kemudian, kalo soal ini kendala ketika penyeleksian KPM menurut Mas Dimas itu apa saja?”

N : “Kendala dilapangan ketika menyeleksi calon KPM adalah menentukan yang bersangkutan layak atau tidak, karena bentuk fisik dengan kenyataan ekonomi yang sebenarnya dimiliki berbeda. Kadang seperti itu membutuhkan koordinasi dan wawancara dengan pemerintah desa serta tetangga sekitar. Selama ini komunikasi dengan perangkat desa *fine fine* aja. Khusus untuk program PKH memiliki tim yang terdiri dari pendamping tiap kecamatan/desa, pendamping desa kemudian membentuk kelompok-kelompok di setiap RT atau tergantung kebutuhan geografis. Kelompok ini memiliki ketua yang berfungsi sebagai penyambung lidah informasi dari pendamping PKH. Misalkan ada informasi besok ada penyaluran nah ketua ini menyampaikan ke anggotanya yang lain.”

P : “Soal penyaluran itu apakah ada kendala tertentu Mas?”

N : “Sejauh ini engga ada karena pencairan langsung ditransfer dari pusat ke rekening masing-masing. Paling kalo masalah kartunya rusak hilang nanti kita bantu advokasi ke bank.”

P : “Kalo yang lewat POS itu bansos apa?”

N : “Dulu PKH pakai POS dari 2014 sd 2017, 2017 ppertengahan sampai saat ini melalui bank atau imbara.”

P : “Kalo demikian ada kemungkinan KPM tertentu terkendala mungkin akomodasi atau fisik ketika akan mengambil ke bank misalnya, masalah seperti itu bagaimana solusinya?”

N : “Kalo POS pasti mendekat ke balai desa, kalo imbara secara aturan itu KPM bebas mengambilnya bisa di atm, bank, atau agen atm. Nah agen atm ini biasanya dimintai tolong untuk mendekat ke wilayah warga.”

P : “Berbicara mengenai tepat sasaran atau belum khususnya bansos PKH ini menurut Mas Dimas apakah sudah tepat?”

N : “Dari tahun 2014 – sebelum covid, namun menjelang covid sampai sekarang menurut saya ada yang beberapa tidak tepat. Karena penambahan peserta PKH tidak melalui validasi di lapangan, pemerintah pusat mengambil peserta baru dari DTKS, berangkat dari kondisi tersebut tugas baru untuk tim PKH kemudian mentidak layakkan peserta dan ini lebih sulit. Ketika harus menghadapi peserta yang tidak menyadari dirinya mampu secara ekonomi sehingga enggan untuk mengundurkan diri sebagai penerima. Upaya yang dilakukan tim PKH dengan memberi motivasi sampai dengan koordinasi bersama pemerintah desa untuk memintai surat keterangan desa secara legal menjadi dasar tim PKH mengeluarkan yang bersangkutan.”

P : “Ini juga bergantung dari penilaian dan tindakan perangkat desa ya kurang lebih?”

N : “Tidak asal penerima ini menyadari langsung, jadi sampai ke desa itu kalo mohon maaf ada orang-orang yang merasa tidak minta terus kenapa harus menolak pemberian bansos itu padahal sebetulnya mampu secara ekonomi. Hanya sebagian aja.”

P : “Sejauh ini ketika pemerintah desa dimintai surat keterangan seperti itu apakah ada kendala atau penolakan?”

N : “Belum tentu, macam-macam karena tetap desa yang lebih paham, pemdes yang saya maksud bukan perorangan saja melainkan keseluruhan perangkat desa sampai dengan kadus yang masing-masing memiliki pandangan. Karena taraf ekonomi tidak bisa disamakan bisa jadi si A dengan kondisi ekonomi di desa Y dianggap mampu namun bila si A ini tinggal di desa Z dianggap tidak mampu, jadi biasanya sudut pandang desa menjadi pertimbangan mengingat pemdes lebih paham.”

P : “Mungkin ini pertanyaan terakhir, menurut pandangan Mas Dimas secara pribadi adakah penilaian subjetkif aparat ketika menyeleksi KPM (dalam musrenbang, seberapa kuat kendali kepala desa/perangkat)?”

N : “Kembali lagi, pandangan taraf ekonomi itu tidak bisa dibakukan kita harus menggali informasi secara mendetail dari berbagai narasumber, ketika apakah ada perangkat yang memberikan pembelaan lebih itu pasti ada karena perangkat itu lebih paham akan kondisi yang bersangkutan. Power kepala desa untuk menentukan putusan calon KPM yang layak diusulkan, tentunya yang bertanda tangan pasti kepala desa tetapi ketika musyawarah desa saya pastikan birokrasi berjalan. Karena proses itu melibatkan unsur-unsur APH, tokoh masyarakat, DINSOSPPPA, artinya ketika ada kepala desa yang mungkin ingin menguasai maka akan sulit karena birokrasi tetap berjalan dengan benar meskipun mungkin ada perdebatan dalam penetapan.”

unrecorded

"Saya rasa hampir disetiap tempat permainan politik itu pasti ada entah seperti apa bentuknya, mungkin pasti ada perbedaan bagi yang pejabat yang berkuasa dalam memberikan sikap antara pendukung dan bukan pendukungnya dahulu."

Nama : Sumiyati
Keterangan : Pendamping Sosial (Ampelsari)
Tempat : Via telfone
Waktu : 10 Juni 2023

P : "Melanjutkan pembahasan saya terkait data pembanding untuk jumlah penerima PKH Ampelsari dengan wilayah lain."
N : "Kebetulan saya ada sedikit catatan awal penerimaan PKH tahun 2014, jadi catatan kecil itu kan data calon penerima manfaat kemudian hasilnya yang menjadi penerima manfaat"
P : "Untuk tahun-tahun berikutnya apakah Ibu ada catatan?"
N : "Adanya tahun 2014. Soalnya kalo sekarang validasi by sistem jadi tidak ada catatan. Sistemnya berbeda dengan awal distribusi PKH."
P : "Kebetulan saya membutuhkan data pembanding yang menyatakan bukti sampai sekarang Ampelsari jadi wilayah terbanyak menerima bansos PKH. Karena hal-hal ini disampaikan oleh beberapa orang jadi saya ingin mengkonfirmasi dan memvalidasi datanya, apakah dapat dibantu?"
N : "Itu terbanyak karena saat ini Ampelsari termasuk pemerintah desa di wilayah Kelurahan Banjarnegara ya dan datanya memang terbanyak di satu ring ini dengan dasar pembandingnya satu wilayah kecamatan. Di sini Kecamatan Banjarnegara terdiri dari empat desa dan sembilan kelurahan termasuk Ampelsari pemerintah desa di dalamnya."
P : "Menjadi penerima terbanyak tersebut terhitung sejak awal sampai sekarang atau sekarang sudah mengalami perubahan atau penurunan rangking?"
N : "Kalo ini sejak dari awal jadi sampai sekarang masih terbanyak, kita menggunakan data di tahun ini 2023 Ampelsari masih terbanyak."
P : "Adanya perbedaan gap penerimaan setiap wilayah ini disebabkan karena apa Bu faktornya?"
N : "Gap ini disebabkan ketika tahap awal PKH tahun 2014 saat validasi di semua desa kelurahan Kec Banjarnegara, bahkan di satu kelurahan Wangon hanya dua orang yang menerima jadi kita meragukan apakah betul hanya 2 orang yang membutuhkan. Saya menjelaskan sedikit perbedaannya BLT-DD desa mendata lewat musdes muskel itu ada penetapan nah ibaratnya itu yang diusulkan sudah pasti menjadi peserta dan penerima. Sedangkan PKH data turun dari atas dan nama yang tertera pada data hanya menjadi calon belum menjadi peserta, jadi desa tidak tahu siapa saja calon penerimanya."

P : “Menyinggung soal kasus di Wangon tersebut apakah karena kelurahannya kurang aktif dan partisipatif sehingga yang diusulkan sedikit dapat menjadi faktor perolehan jatah menjadi lebih besar?

N : “Kalo itu menurut saya karena Ampelsari memang yang masuk data pengusulan terbanyak sejak dahulu, jadi DTKS nya ketika turun pun memang banyak dan mungkin untuk menurunkannya itu yang sulit. Pengusulan ini yang dimaksud dalam pengusulan ke DTKS sebagai database ya bukan pengusulan ke PKH nya.”

P : “Sebetulnya kalo dari warga secara mandiri mengusulkan ke pemerintahan terdekat kelurahan atau desa apakah bisa?”

N : “Bisa sebenarnya kapanpun bisa mengusulkan, cuma *entry*-an data yan diusulkan dari pemerintah desa melalui DINSOS itu ada masanya tiga bulan sekali kalau tidak salah sekarang sebulan sekali dan ada penetapan setiap empat bulan sekali dari pemerintah pusat.”

P : “Saya ingin menanyakan juga ketika pandemi kemarin terkait BLT Covid selain dari BLT desa apakah dari pemkab dan pemprov juga ada?”

N : “Iya ada, kabupaten dan provinsi yang kabupaten berupa uang kalo yang provinsi kalo tidak salah ada yang berupa sembako. Kita memang tidak dilibatkan untuk distribusi bansos selain PKH waktu itu sempat terkibat di program BPNT tetapi sekarang sudah tidak. Jadi untuk Kabupaten Banjarnegara kita tidak terlibat untuk penyaluran dan pengadaan, memang dari awal pendamping dilarang untuk khususnya pengadaan meski bertanggungjawab di penyaluran dan pendataan.”

P : “Kalo begitu pihak yang terlibat dipenyaluran BLT ini melalui siapa dan alurnya bagaimana?”

N : “Untuk BLT itu langsung berurusan dengan pemdes, jadi mulai dari mendata dan penetapan hasil musdes muskel, data penerima itu pun bersyarat tidak boleh penerima PKH, sembako, pokoknya double bantuan tidak boleh.”

P : “Pada implementasinya apakah Ibu menemui atau mendengar keluhan adanya penerima yang double bantuan atau dapat dipastikan di Ampelsari bersih karena hasil penemuan saya di lapangan mengenai BLT Covid ini penerimanya hampir semua KK jadi yang penerima PKH berkemungkinan menerima bantuan covid. Apa ibu paham soal ini?”

N : “Jadi sebelum penetapan kita menyampaikan data peserta yang sudah masuk di PKH, seandainya double menerima bantuan kemarin dialihkan ke yang membutuhkan.”

P : “Kemudian soal kuota atau jatah BLT Covid setiap daerah kelurahan atau desa apakah dibatasi?”

N : “Kalo tidak salah iya dibatasi karena kita tidak terlibat di proses tersebut, jadi ada pertemuan kades lurah untuk saling memberi informasi jatah kuota perwilayahnya sekian-sekian dan apabila satu wilayah mungkin yang kuotanya sudah terpenuhi sebaliknya ada wilayah yang kurang maka akan diberikan.”

P : “Kalo untuk program PKH apakah ada batasan juga dari Kemensos?”

N : “PKH itu hitungannya untuk satu Indonesia ya, jadi bukan dibatasi perwilayah. Pernah waktu itu ada pengenapan 10jt peserta se-Indonesia.”

P : “Kalo spesifik kabupaten begitu apakah ada batasan misal 200 peserta begitu?”

N : “Kabupaten tidak ada batasan.”

P : “Berarti memang dari pemerintah daerah mengusulkan nanti hasil akhir ada di keputusan Kemensos, nggih?”

N : “Iya, yang jelas 2013 Kab Banjarnegara mengusulkan untuk program PKH dengan basis data DTKS sebutannya, kemudian dari data yang diusulkan itu tidak diturunkan semua menjadi calon peserta yang menentukan dari Kemensos sebagai kewenangannya.”

P : “Berkemungkinan setiap tahun penerima manfaat tersebut tidak untuk orang yang sama terus menerus penerima bisa jadi berubah nggih?”

N : “Iya betul, ditambahi sekarang adanya graduasi di setiap wilayah kelurahan atau desa jadi ada yang mengundurkan diri atau dihapuskan dari pemerintah desa karena tidak memenuhi kriteria lagi sehingga terjadi penambahan peserta baru.”

P : “Kalo di Ampelsari bagaimana Bu apakah graduasi sudah cukup banyak?”

N : “Iya sudah lumayan.”

P : “Saya mau menanyakan terkait validasi yang sebelumnya sudah sedikit disebut bahwa validasi hanya melibatkan tiga unsur pendamping, pemdes dengan calon peserta tanpa ada BPD ngih itu bisa dijelaskan Bu?”

N : “Iya untuk validasi memang BPD tidak dilibatkan hanya perangkat dan calon peserta saja. Validasi pun sudah berbeda kini untuk menentukan lanjut tidaknya peserta PKH ini ada melibatkan kadus, perangkat, kaur desa. Validasi dilakukan setelah ada data turun dari Kemensos untuk calon-calon penerima bansos, kami melakukan pertemuan awal untuk memvalidasi dan dari kegiatan ini ada penyaringan lagi untuk meloloskan calon peserta karena akan dicek keabsahan data, syarat komponen, yang menentukan calon *eligible* atau tidak.”

P : “Proses validasi ini dilakukan ketika akan mengusulkan atau setelah ada data yang turun?”

N : “Ini tidak melalui musdes, jadi ketika ada data turun dari Kemensos kemudian data calon penerima PKH ini yang akan di validasi. Yang mengambil data calon penerima di DTKS juga pihak Kemensos, kami tidak bisa menjamin orang yang diusulkan pasti akan menerima bantuan.”

P : “Calon peserta yang divalidasi sudah pasti lolos atau ada tahap penyaringan kembali?”

N : “Proses validasi ini akan menyeleksi orang-orang yang sesuai dengan kriteria atau memiliki komponen, jadi misalnya dari 124 calon peserta yang memenuhi hanya 90 orang saja maka 34 sisanya batal menjadi penerima PKH.”

P : “Mekanisme untuk validasi di tahun sekarang-sekarang ini masih berjalan dengan metode yang sama?”

N : “Bedanya sekarang pakai data bayar, jadi calon penerima ini akan memiliki rekening atas nama diri atau salah satu anggota keluarga yang mana penambahan data rekening baru ini artinya ada calon peserta baru dan kemudian akan kami validasi. Validasi juga berkoordinasi dengan pihak desa untuk yang lebih memahami kondisi warganya tersebut dan melakukan kunjungan ke calon peserta tsb untuk memintai data dukung.”

P : “Data dukung ini kemudian akan disetorkan kepada siapa melalui siapa?”

N : “Data dukung ini dari calon peserta meliputi fc KK, KTP, berkas dukung komponen seperti masih ada anak yang sekolah maka melampirkan rapot, kepemilikan harta. Jadi validasi dilakukan ketika pertemuan awal, pertemuan awal ini juga ada prosesnya mulai dari pra persiapan, sampai persiapan. Unsur eksternal selain perangkat desa juga turut dilibatkan baik dari tenaga kesehatan, dan pendidikan. Nah, kemudian kegiatan validasi ini juga ada batasan waktu Mba misal dalam satu minggu validasi dan *entry* data sudah harus selesai padahal jumlah calon peserta tidak sedikit, dan tidak semua calon peserta itu bisa menghadiri undangan pertemuan awal jadi kita harus kunjungan satu persatu. Contoh kita mau melibatkan RT di perkotaan dari pagi sampai siang mau ketemu tidak bisa karena bekerja, jadi kalo melibatkan RT malah lebih lama jadi aturan dari pusat kita tidak melibatkan RT bergerak secara mandiri.”

P : “Ibu sudah mendampingi Ampelsari selama berapa tahun?”

N : “Saya dari 2019 sekitar 1-2 tahun kemudian diganti pendamping lain selama 1 tahun, dan baru tahun ini bulan Maret saya kembali lagi jadi pendamping Ampelsari. Kebetulan yang pernah mendampingi Ampelsari sudah 4 orang termasuk saya.”

P : “Kegiatan pendamping dengan kelompok PKH ini seperti apa?”

N : “Kegiatan rutin kami ada setiap sebulan tempatnya biasanya di rumah salah satu KPM secara bergilir sekaligus untuk melihat kondisi rumah peserta seperti apa karena barangkali ketika validasi kita kurang teliti, atau peserta tersebut tidak kami temui langsung hanya melalui validasi perangkat maka kami berkunjung sekalian dengan agenda pertemuan rutin.”

P : “Misalnya ada kasus data yang turun dari Kemensos kemudian divalidasi dengan mengunjungi calon peserta tersebut tetapi ternyata yang bersangkutan sudah tidak memiliki komponen syarat PKH padahal sudah dibuka rekening atas namanya, kemudian bagaimana tindakan dari pendamping?”

N : “Ini seperti yang kasus yang saya jelaskan tadi dari 124 dan 34 orang tidak bisa masuk diantaranya bisa terjadi tidak memiliki komponen, atau domisili tidak sesuai, sedang merantau dan kami tidak menemukan keluarga intinya, atau ketika dikunjungi orang tersebut rumahnya sudah layak maka kami beri motivasi untuk graduasi mandiri.”

N : “Kegiatan setiap bulan pertemuan kelompok ini tidak hanya menyampaikan informasi saja tetapi istilahnya ada sekolah PKH atau P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) jadi disitu ada lima modul yang kita sampaikan diantaranya modul ekonomi modul kesehatan

modul pengasuhan anak, lansia dan disabilitas. Saat ini kita difokuskan untuk materi stunting dan bekerjasama dengan pihak Puskesmas jadi kita mendatangkan ahli gizi, sanitasi lingkungan, untuk bekerjasama dengan pendamping di pertemuan kelompok. Kemudian secara rutin kami menghadirkan penyuluh agama itu dari KUA untuk menyampaikan materi siraman rohani, harapan kita dengan pertemuan semacam ini akan memotivasi dan menyadarkan KPM yang sudah tidak layak secara komponen agar mengundurkan diri tanpa ada paksaan. Disamping itu kita juga bekerjasama dengan lintas sektor pendidikan untuk mensosialisasikan program, biasanya dari SMK Al-Fatah."

P : "Sejauh ini menurut Ibu penerima PKH di Ampelsari sudah tepat sasaran belum?"

N : "Belum mba, karena mungkin di tahun 2014 awal penerima PKH masih miskin tapi beberapa tahun setelah menjadi peserta mengalami perubahan ekonomi secara drastis naik atau sebaliknya menurun. Nah peserta yang mengalami kenaikan taraf ekonomi ini yang menjadi sasaran graduasi."

P : "Sasaran graduasi itu apabila bukan inisiatif secara mandiri apakah akan menjadi sulit?"

N : "Iya kalau berbicara graduasi secara mandiri itu memang sangat membutuhkan kesadaran diri, kaitannya dengan hati dan rasa syukur jadi kita tidak bisa memaksakan meskipun kita punya kuasa untuk melakukan graduasi secara paksa dengan pihak desa."

P : "Apakah kasus seperti ini pernah terjadi di Ampelsari Bu?"

N : "Iya pernah. Ini aturannya baru, dulu tidak ada kewenangan seperti ini. Pendamping sebelum saya sudah mulai mengeksekusi. Tetapi ini ada dampaknya, apabila graduasi secara mandiri maka bansos jenis lain yang diterimanya akan ikut terhapus termasuk PKH, BPNT, KIS juga. Itu menjadikan pro kontra karena kebanyakan kasus, KPM sudah mau graduasi mandiri tetapi dia masih membutuhkan KIS untuk perawatan rutin kesehatan misalnya itu jadi permasalahan. Disamping itu ada yang sudah dieksekusi untuk graduasi mandirinya oleh pemerintah desa karena itu nanti yang mengeksekusi pemdes, di saya pun juga sudah bisa melalui aplikasi SIKS-NG setiap tanggal 15-23. Dan ini mulai ada juga pengaduan semisal kartu sudah tidak bisa dipakai. "

P : "Mungkin masih ada beberapa warga yang pada kenyataannya layak secara kriteria namun tidak memperoleh bansos jenis regular. Melihat kondisi tersebut hal apa atau campur tangan pendamping menindaklanjuti sejauh apa?"

N : "Kita akan membantu cek apakah warga yang layak secara kriteria sudah terdaftar di DTKS atau belum, kemudian apabila memenuhi kriteria akan kita bantu daftarkan melalui pengusulan."

Nama : (Inisial) K
Ket : Tokoh Masyarakat
Hari, tgl : Kamis 16 Februari 2023

P : “Apa saja inovasi kepala desa”
N : “Pengembangan BUMDES terkait prasarana dan prasarana olahraga, untuk peningkatan ekonomi gedung dan fasilitas desa mau disewakan seperti lapangan bola, gor, lapangan futsal. kalo pembangunan yang lain kaya pengaspalan jalan, bantuan RTLH, jamban sehat itu sama seperti desa yang lain. pembangunan hamper merata. fokus utama pembangunan berdasarkan usulan-usulan dari RT RW yang sekiranya mendesak diutamakan, pembahasan di musrenbang desa 1x setahun.”
P : ”Ada peninjauan atau observasi ke lapangan tidak selain dari musrenbang”
N : “Bu kades termasuknya sering turun ke desa, kades kalo ga sering turun ke lapangan mau terpilih lagi ya susah kalo di kantor terus nanti ga ada yang kenal.”
P : “Ini termasuk strategi ya sepertinya, selain pendekatan jemput bola seperti itu apa lagi strategi yang Anda ketahui?”
N : “Banyak memberikan bantuan sosial, karena Desa Ampelsari ini banyak sekali menerima kuota bantuan sosial baik jenis RTLH, jamban sehat, bantuan pangan non-tunai, BLT, PKH.”
P : “Skema sampai bisa Ampelsari menerima kuota paling banyak dibandingkan yang lain caranya seperti apa?”
N : “Data dulu penduduk miskin Ampelsari paling banyak, walaupun kalau dilihat faktanya sama dengan desa lain cuma dulu daftar DTKS paling banyak disini termasuk zona merah kemiskinan secara angka kalau secara fakta ga beda dari desa tetangga. dulu sebelum saya disini yang mengusulkan itu kan banyak-banyakkan, jadi yang paling banyak dianggap paling miskin supaya bisa diloloskan.” “..ehm sampai saat ini bertambah terus, usulan baru ada usulan yang lama tidak dihapus-hapus jadi penerimanya banyak”
P : “Sebetulnya kondisi ekonomi masyarakat desa seperti apa? Mayoritas pekerjaan penduduk dalam sektor apa?”
N : “Disini jauh dibawah UMR, tidak ada yang menonjol jenis pekerjaannya hampir semuanya merata”
P : “Pengeluaran desa terbesar apakah dari BLT-DD?”
N : “Tidak, pengeluaran terbesar dari pembangunan infrastruktur. BLT-DD diusulkan atas pembahasan bersama BPD. Angka BLT-DD tahun 2022 itu 25% kalo sekarang minimal 10-25%”
P : “Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang konkrit apa?”
N : “Iya UMKM diusulkan, bantuan modal, bantuan-bantuan sering diusulkan ke pemkab dan pemprov, pembagiannya hampir merata.”
P : “Pembagian bansos efektif menunjang perekonomian masyarakat atau tidak menurut Anda?”

N : “Ya efektif, konsumsinya bertambah angka kemiskinannya kan berkurang kalo bantuannya berhenti ya kemiskinannya bertambah lagi”

P : “Proses keberjalanan musrenbang itu seperti apa, mungkin dapat diceritakan siapa-saiapa yang menjadi pimpinan, kemudian adakah pengaruh orang-orang yang powerfull dalam menentukan keputusan, apakah adil dan mufakat untuk pelolosan DTKS?”

N : “LP3M yang menjadi pemimpin forum, pengaruh ya pastinya ada dari orang-orang yang berpengaruh, sejauh ini ya adil”

P : “Menurut Anda, strategi kades untuk mempertahankan pemilih seperti apa?”

N : “Pemberian bantuan sosial yang utama si, dan turun ke masyarakat”
“..semua orang dikasih cuma itu kan ganti-ganti nama penerimanya, tetapi kalau dia (penerima) mengusulkan diri atau diusulkan dan memiliki hubungan dekat (dengan Kades) tetap dipertahankan supaya menerima”

P : “Kalau kasusnya penerima ini sebetulnya tidak memenuhi syarat tapi memiliki hubungan dekat dengan kades apakah tetap dipertahankan sebagai penerima bansos?

N : “Kalau disini engga si karena bisa menyebabkan kecemburuan sosial, kalau BLT-DD yang menentukan desa kalau bansos (regular) pusat yang menentukan jadi meskipun sudah mampu secara ekonomi kadang tetap menerima. Ya bagaimana ya namanya bantuan sosial jenis apapun itu pasti menimbulkan kecemburuan sosial satu sama lain.”

P : “Lantas cara-cara menentukan warga yang layak menerima BLT-DD itu seperti apa?

N : “Dari pengusulan RT RW dan nanti dibahas bareng BPD”

P : “Menurut Anda faktor apa yang menyebabkan kades mencalonkan diri dan terpilih sebagai kepala desa? Apakah beliau berperan banyak sebagai tokoh desa, mungkin aktif sebagai warga, atau seperti apa? ”

N : “Yang jelas keluarganya mampu secara finansial, disini kalo kades kan modalnya harus banyak kalo modalnya pas-passan ya suaranya pas-passan juga. sebelum menjabat tidak aktif biasa saja, Cuma kalo ortunya itu pengusaha jadi mungkin satu desa sudah mengenal ortunya popularitas ini juga berpengaruh.”

P : “Kalo di desa ini metode kampanye dan pendekatan dari timses bagaimana? Apakah dilakukan secara secara terang-terangan? Karena saya mendapat informasi dari salah satu warga bahwa kampanye timses tidak terlalu terlihat.”

N : “Biasanya dibelakang layar, pendekatannya timsesnya mengumpulkan warga yang sekiranya bisa dipengaruhi untuk berkumpul dirumah salah satu warga, bukan terang-terangan berkumpul di balai seperti itu, jadi ya pendekatannya di lingkungan terdekat saja.”

P : “Lantas menurut Anda faktor apa yang membuat kades menang kembali di periode kedua? Mungkin dari pandangan masyarakat kira-kira kenapa memilih beliau kembali”

N : “Mungkin karena pembangunan, waktu kades menjabat periode pertama kebetulan UU tentang Desa disahkan, jadi ada kucuran dana desa yang

secara otomatis pembangunannya lebih massif dari sebelumnya. pembangunan di jalan yang puluhan tahun tidak tersentuh jadi tersentuh, momentumnya kebetulan pas. selain itu hampir disemua desa, bupati, dpr pakai politik uang, juga ya sama calon-calon lain (pesaing) menggunakan metode yang sama."

"…masyarakatnya banyak dulu pemilihnya 3000an, dan wataknya masih pragmatis tidak peduli politik melihat keuntungan apa yang bisa diberi baru mereka berkenan mencoblos, tidak peduli visi dan misi"

P : "Pada pemilihan 2017 lalu ada berapa calon?"

N : "2017 ada 4 calon, kades ini perempuan satu-satunya"

Nama : (Inisial) Y
Ket :Tokoh Masyarakat
Tempat : Rumah Narasumber
Hari, tgl : Sabtu, 18 Maret 2023

P : “Bapak warga asli Desa Ampelsari atau pendatang?”
N : “Saya asli warga sini dan tinggal dari kecil.”
P : “Sebagai warga desa sekaligus pengamat pemerintahan, bagaimana kesan Bapak terhadap kinerja pemerintah desa periode ini?”
N : “Selama saya menjabat tidak ada keluhan dari masyarakat yang secara khusus membahas soal persoalan jadi saya kira tidak ada masalah yang cukup serius.”
P : “Tapi kalau menurut Bapak sendiri secara keseluruhan bagaimana, terlebih telah mendampingi kurang lebih lima tahun kebelakang?”
N : “Kalau yang namanya kepala desa, kalo suka sama engga suka kan pasti beda. Kalo di Desa Ampelsari, karena sini termasuk desa dari 4 desa di Banjarnegara. Banjarnegara ada 4 desa dan 9 kelurahan, perbedaannya kelurahan sama desa, kalo desa lebih ramai kekeluargaannya tinggi, pilkadesnya juga ramai, tapi dampak negatifnya karena ada praktik politik yang kuat jadi masyarakat terbagi antara yang pendukung dan non-pendukung. Apalagi sekarang pilkades modelnya TPS, jadi TPS 1 RW 01, TPS 02 RW 02, setiap RW TPSnya satu. Sekalinya dibuka bisa langsung disimpulkan oh wilayah ini pendukung si A, wilayah yang bukan pendukung mana saja juga kan kelihatan. Misalnya RW sini bukan pendukung yang terpilih otomatis perhatiannya tetep kurang yak arena politik.”
P : “Kalau boleh tau sejak kapan perlakuan yang berbeda itu mulai diperlihatkan? Apakah pada periode pertama kades M juga demikian?”
N : “Kalau periode pertama ga seperti itu, baru periode kedua ini saja.”
P : “Pemilihan pada periode pertama apa belum menggunakan sistem TPS per-RW atau sudah?”
N : “Belum, jadi campuran beberapa wilayah gabung di satu TPS tapi tetap ada 5 titik TPS.”
P : “Apakah bisa diceritakan perlakuan yang berbeda tadi itu seperti apa contohnya?”
N : “Contohnya jalan Tambakan-Ampelsari, itu kan lama tidak diperbaiki. Nah dulu disana ada calon atau lawannya bila dipandang ya karena hal itu jadi lama dibiarkan jalannya rusak parah. Tapi secara detail alasannya kenapa tidak segera diperbaiki tidak ada yang tahu. Baru diperbaiki itu kemarin-kemarin ini. Jadi, karena wilayah lawan politik mungkin ya seperti itu.”
P : “Apakah ada alasan lain atau pernah mencoba menanyakan kenapa lama dibiarkan?”
N : “Kalo di musdes pembahasan dikategorikan berdasar skala prioritas tiap RW mengajukan, nanti dipilih yang paling dirasa prioritas atau harus segera dilaksanakan. Kebetulan yang disitu misalnya sudah masuk

anggarannya kemudian diganti ke prioritas yang lain tapi tidak kelihatan karena kepentingan politik, misalnya karena hal-hal lain contoh kemarin covid 2 tahun dana dialihkan untuk penanganan covid. Jadi pembangunan kemarin tidak pakai dana desa akhirnya pakai dana aspirasi."

P : "Menyoal skala prioritas tadi kalau berkaca dar lima tahun kebelakang yang seringnya masuk skala prioritas 1 2 3 atau yang diutamakan apakah dari RW pendukungnya saja atau bagaimana kondisi sebenarnya?"

N : "Kalo merata-merata si, setiap RW paling tidak ada priortas yang diusahakan dan masing-masing kebutuhan berbeda tapi insyaallah adil."

P : "Berbicara mengena praktik politik desa, atau misal mengambil *moment* menjelang pemilihan kepala desa itu gambaran situasi politiknya seperti apa?"

N : "Kalo di Ampelsari si aman seperti biasa, kemarin waktu pendaftaran aman, mengadakan kampanye juga kampanye damai bersama, iring-iringan menyampaikan visi misi berlima kandidat itu diarak keliling desa didampingi Polres, Polsek dan Koramil."

P : "Kalo diluar dari jadwal yang ditentukan apa kandidat tetap berkampanye di sekitar desa?"

N : "Jadwal kemarin engga ada jadi hanya kampanye damai bersama saja."

P : "Soal tim sukses mungkin barangkali bapak paham bagaimana strategi dan pergerakan tim sukses selama masa kampanye?"

N : "Saya kurang paham. Tapi kalo pengajian semua calon itu pasti datang."

P : "Kemudian, saya ingin tahu capaian kinerja dari kades diperiode pertama seperti apa mungkin keberhasilan program yang diraihdan yang Bapak ketahui."

N : "Setiap masa akhir jabatan yang saya lihat belum seratus persen. Makanya diperiode kedua yang ditekankan beliau ingin melanjutkan hal-hal yang belum selesai dari periode pertama."

P : "Lalu diperiode kedua ini yang sepertinya terlihat sudah berhasil apa saja Pak?"

N : "Pembangunan itu pun belum berhasil, lapangan futsal itu juga sedang dibangun."

P : "Apa ini terkait pengelolaan BUMDES juga soal lapangan futsal tersebut? Apakah masih berjalan?"

N : "Sudah dibentuk dua kali tapi belum ada hasil juga gagal dipengelolaannya. Entah siapa itu yang membidik orang-orangnya yang jelas sudah dua kali tidak jadi, desa kan memberi modal istilahnya modal untuk pengelolaan sebenarnya banyak fasilitasnya ada lapangan, gor. Kemarin baru dibentuk lagi dan baru mau berjalan."

P : "Kalo diperiode pertama kegiatan BUMDES apakah sudah berjalan juga?"

N : "Dulu tidak ada."

P : "Menyoal masalah ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan bagaimana Pak, karena saya mendapat informasi penerima kuota bansos disini terbanyak se-kecamatan. Kalo berdasar pengamatannya Bapak apa betul demikian?"

N : “Iya memang terkenalnya desa Ampelsari banyak yang menerima bansos, tapi itu kan data dari pusat. Saya kira hampir sama di setiap desa. Mungkin juga karena salah satu faktornya warga disini banyak.”

P : “Bapak selaku pimpinan di Musdes *nggih*, apakah boleh diceritakan bagaimana proses pembahasan calon penerima bansos dan RTLH?”

N : “Musdes saya sebagai pimpinan. Untuk masalah BLT biasanya kepala desa memberikan informasi ada kuota sekian 100 misalnya, nanti tiap RT dipersilahkan mengajukan warga sebanyak-banyaknya terutama yang belum dapat PKH. Setelah itu di Musdes nanti tetap dibahas semua yang sudah ditulis per RW, kaya kemarin misalnya ternyata kuotanya 70 yang diajukan 100 lebih jadi akan dikurangi. Per RW dibahas layak atau tidak nanti kalau tidak layak dicoret.”

P : “Yang memvoting itu layak atau tidak apa seluruh peserta forum atau siapa saja Pak?”

N : “Ini untuk BLT ya, ada kadus. Usulan dari RT yang yang sampai di Musdes, itu nanti ada Kadus, Perangkat dan BPD terus dipilih siapa yang paling pantas.”

P : “Berarti tidak ada pembedaan sikap atau subjektivitas ketika memilih penerima seperti yang Bapak tadi singgung ada beda antara pendukung dan bukan?”

N : “Tetap menerima yang penting masih layak, kecuali PNS dan pengusaha itu engga dapet. Kemarin itu kaya pemerataan semuanya dapat.”

P : “Ini untuk yang bansos BLT ya Pak? Kalau untuk bansos PKH apakah alurnya sama?”

N : “Kalau PKH saya kurang tahu itu kan berurusan dengan DINSOS kabupaten juga, data juga dari pusat misal sudah mengajukan belum tentu keluarnya sama seperti yang diajukan, bansos kabupaten dan provinis juga seperti itu jadi kadang tidak tepatnya karena itu. ”

P : “Tetapi yang mengajukan itu prosesnya tetap lewat musdes atau pemerintah desa yang mengurus langsung?”

N : “Kalo yang bansos covid itu lewat musdes.”

P : “Yang PKH bagaimana Pak dibahas di musdes juga?”

N : “PKH kurang tahu.”

P : “Karena kemarin saya tanya ke ketua kelompok PKH dan kurang lebih alurnya sama seperti yang dijelaskan bapak ketika proses pengusulan di musdes itu?”

N : “Tapi selama saya menjabat saya belum pernah membahas PKH itu.”

P : “Bapak pernah menerima keluhan atau protes dari masyarakat terkait bansos Pak?”

N : “Tidak sejauh ini, apalagi waktu covid kemarin anggarannya sangat besar jadi pembagiannya juga banyak dan merata.”

P : “Saya konfirmasi lagi berarti yang dibahas di musdes sepengetahuan Bapak hanya BLT DD,?”

N : “Kalau mengusulkan si tetap mengusulkan yang kabupaten dan provinsi, tetap di musdes kan kalo ada pengajuan.”

P : “Apakah yang diputuskan bersama berjalan sesuai dengan kesepakatan, pernah tidak implementasinya berbeda?”

N : “Implementasinya si pas berjalan sesuai, kecuali kalo ada perubahan kebijakan.”

P : “Mungkin dapat diceritakan perubahan yang pernah terjadi itu seperti apa?”

N : “Kalo ada aturan baru ya harus dirubah, pernah beberapa kali perubahan itu sudah tiga kali. Pokoknya kalo ada perubahan aturan dari pusat. Yang penting kalo dari saya itu si dilaksanakan terus sesuai atau tidaknya itu kan udah masuk ke pengawasan, saya si paling beberapa kali cek untuk memastikan pelaksanaan. Misal ada pembangunan kok hasilnya tidak bagus terus saya mau melihat nota dsb itu bukan kewenangan saya.”

P : “Sebetulnya dari Bapak bisa memberi teguran *nggih?* Pernah atau tidak Pak?”

N : “Bisa, tapi sejauh ini saya belum pernah karena tidak ada kesalahan yang fatal sekali. Paling penyampaian biasa kalo ada keluhan dari warga-warga seperti itul, dan berjalan di forum kalo secara langsung personal tidak pernah si.”

P : “Hubungan Bapak dengan kades seperti apa? Apakah beliau juga koordinatif?”

N : “Sebagai mitra baik-baik saja, orangnya terbuka tetapi kalo dibelakangnya beda saya tidak tahu.”

P : “Untuk koordinasi tidak ada kendala sejauh ini ya Pak?”

N : “Kalo yang berhubungan BPD mudah.”

P : “Kemudian saya ingin tahu terkait pelayanan di pemerintahan desa apakah ada kendala tertentu? Mengingat ada keluhan dari warga desa yang saya dengar bahwa pelayanan di desa lama dan terkait hal tertentu sampai perlu mengeluarkan amplop untuk mempermudah, menurut Bapak bagaimana?”

N : “Sebenarnya kalo langsung di desa itu cepat. Kalo di sini kemarin kadusnya sepertinya memang kadusnya. Makanya kalo ngomong ke saya untuk ngurus perubahan SPPT itu saya suruh langsung ke desa karena kan kadus sifatnya hanya mengetahui. Jadi kalo ada kendala dipersulit itu di kadusnya, lebih baik kalo mau balik nama langsung ke desa saja. Soalnya kemarin ada beberapa orang lewat kadus sudah bayar tapi ternyata lupa sehingga tidak dikerjakan. Istilahnya yang tidak benar itu oknum seperti itu lah.”

P : “Kalo boleh tau masing-masing RW pasti memiliki kondisi politik yang berbeda, ini kaitannya dengan keberpihakkan mayoritas warga pada kandidat tertentu, wilayah mana saja yang menjadi pendukung dan bukan pendukung kades M melihat dari hasil TPS 2017 kemarin?”

N : “RW 1 dan 2 itu sebagai TPS 1 dan 2 yang kurang dukungan suara terhadap kades M, kalo RW 3,4, dan 5 itu sudah cukup banyak. Makanya pandangan masyarakat menilai wilayah RW 02 terutama yang jalan petambakan menuju al-fatah dibiarkan lama itu karena hal itu.”

P : “Melihat pendukung kades yang banyak dan bertambah di periode kedua ini, menurut Bapak faktor apa yang mempengaruhi warga memilih beliau kembali?”

N : “Yang ditekankan ketika mencalonkan diri kembali itu untuk melanjutkan, saya rasa itu. Tapi kalo ada yang beranggapan popularitas keluarga termasuk jadi faktor ya mungkin bisa jadi iya, terutama warga di wilayah RW 03 dekat rumahnya. Intinya si sebelum beliau menjabat kades ya tidak banyak yang tahu beliau, kecuali orangtuanya.”

P : “Saya ingin tahu menurut pandangan Bapak sebetulnya pengetahuan politik masyarakat itu seperti apa, apakah mereka cukup peka dan aktif berpartisipasi politik, atau sebaliknya pragmatis?”

N : “Saya rasa kesadaran itu kurang ya, tapi pengetahuannya macam-macam ya ada yang sadar dan kurang menyadari bahwa pemilihan itu penting. Hanya sekedar memilih saja tidak memperhatikan betul visi dan misi kandidat.”

P : “Setiap pemilihan kepala desa pasti memiliki dinamika yang mungkin cukup kuat terutama di pedesaan yang masih kental dengan kehidupan sosial budaya pula. Saya ingin tahu apakah di desa ini masih ada praktik politik uang itu yang pertama, kedua adakah perbedaan yang kontras dari pemerintah desa atau kades M dalam memberi sikap kepada pendukung dan bukan pendukung.”

N : “Pertama masalah politik uang itu saya tidak tahu dan tidak ikut campur karena itu urusan tim sukses dan saya tidak berani menyampaikan itu ada atau tidak, lebih baik tanyakan kepada yang menerima atau tim sukses. Yang penting saya tidak tahu dan tidak menerima. Tapi jelas adanya setiap ada pemilu adanya politik uang seperti itu sudah wajar, untuk memastikan tepatnya disini saya tidak bisa memastikan itu valid. Pasti pemilihan kepala desa itu ramai da nada positif negatifnya, kekeluargaan kuat, lebih akrab dengan kades. Berbeda dengan kelurahan belum tentu semua warganya tahu lurahnya siapa. Kalo soal perbedaan sikap, itu saya tidak tahu karena sebelum keputusan bagaimana dibelakang saya tidak tahu.”

P : “Apakah pernah ada perubahan nama dari apa yang ditetapkan dengan penerima yang dibagi bansos?”

N : “Saya rasa tidak, tapi penghapusan nama itu sudah biasa di musdes. Karena kuota terbatas 20% jadi harus dibandingkan kondisi warga disini dengan RW lain siapa yang paling membutuhkan tidak bisa merata setiap RW menerima jumlah kuota yang sama dan kadus yang paling memahami kondisinya. Maka saya bilang ke RT kalo mengajukan itu jangan dijanjikan karena belum tentu menerima.”

Nama : (Inisial) H
Ket : Tokoh Masyarakat
Tempat : Rumah Narasumber
Hari, tgl : Senin, 27 Februari 2023

P : "Proses perumusan nama-nama sebelum masuk ke DTKS itu seperti apa?"

N : "Dari proses musyawarah desa musrenbang itu. Tetapi pernah terjadi apa yang disebut itu orang-orang non-pendukung walaupun namanya sudah diketok palu dengan dasar musyawarah untuk diusulkan, kemudian sudah dirapatkan dari BPD juga sudah menyepakati tetapi dibelakang layar itu ada perubahan. Karena nama yang sudah disetujui malah tidak menerima bantuan, justru pihak lain yang namanya tidak diusulkan menerima bantuan. Jadi ceritanya memang warga yang tidak mendukung dia pencalonan jadi kepala desa itu lebih sulit menerima bantuan, intinya si mengutamakan orang-orang yang mendukung beliau."

P : "Jadi meskipun diproses musrenbang sudah ditetapkan tetapi dibelakang ada perubahan seperti itu ya Pak?"

N : "Iya makanya disitu dapat dikatakan bermain di belakang layar."

P : "Sudah pernah mendengar cerita bahwa (kades) itu merubah sendiri nama-nama tersebut atau ini hanya dugaan saja Pak"

N : "Nah kan gini, contoh ya saya mengusulkan untuk warga saya sendiri sampai kepada ketua BPD nya, katanya si Alhamdulillah dari nama-nama yang diusulkan sudah di acc, toh pada akhirnya ketika pembagian bansos itu malah tidak masuk sedangkan pihak yang lain malah dimasukan, nah diantara orang-orang yang dimasukan itu adalah pendukung, pernah terjadi seperti itu."

P : "Sering atau tidak terjadi seperti itu?"

N : "Selama kades menjabat ini ya 10 tahun, makanya saya sosialisasikan dengan warga-warga yang lain terkait dengan bantuan-bantuan. Cuma kan gini, informasinya dari kepengurusan PKH terutama, itu berarti kaya semacam dahulu lah kepemimpinannya Soeharto. Dari anggota PKH disini kan sudah 568, nah kemarin sudah mengatakan yang namanya verifikasi dari verifikasi itu kan cuma dibutuhkan 300 atau 250 kemarin juga dirapatkan kan, tapi sampai sekarang ini verifikasi tsb belum sampai validasi. apalagi ini untuk menjelang dia katanya akan mencalonkan diri kembali, nah dari 568 tsb itu kan sudah dikecam kalau tidak milih saya nantinya saya akan coret dari PKH itu seperti itu politiknya."

P : "Apa beliau menyampaikan secara terang-terangan? Dimana dan kapan?"

N : "Ketika itu ada rapat PKH, kan ada pertemuan-pertemuan dengan PKH tiap masing-masing dukuh, dari anggota PKH banyak sekali yang bercerita seperti itu. Bahkan sampai sekarang ini yang seharusnya sudah keluar (sebagai nama penerima) kok masih terhitung juga menerima, disini kan banyak lah yang menerima, beberapa itu sebenarnya sudah layak secara ekonomi diapun sudah mengajukan kepada pihak terkait untuk

mengundurkan diri dan diganti orang lain. menurun sekarang meskipun sudah tidak menerima uang untuk biaya sekolah tetap menerima yang namanya PKH Jumbo yaitu hanya mendapat sembako."

P : "kalo selain PKH itu ada kelompoknya juga atau engga? misal KIP atau bansos lain?"

N : "kalo KIP ini dari pihak sekolah jadi pemdes hanya mengetahui prosesnya dari sekolah langsung. tapi yang menerima KIP khususnya orang-orang PKH sudah diback up sama kepala desa jadi sekalian dari KIP masuk ke PKH."

P : "pasti kan ada kecemburuan sosial ya Pak antar masyarakat yang mungkin sudah lama mengajukan diri atau diusulkan tapi belum juga menerima padahal warga tsb layak secara kriteria, nah sejauh ini untuk orang-orang non-pendukung yang seperti ini apakah masih mendapat kesempatan/kuota atau melihat kondisi ini kepala desa cenderung acuh saja mementingkan kelompok pendukungnya."

N ; "Karna kemarin sudah diadakan verifikasi, berarti yang belum menerima itu kan kebanyakan non-pendukung yang sebetulnya layak terakhir verifikasi itu 2021 tetapi sampai detik ini belum ada hasilnya untuk mendatangkan validasi, sampai sekarang masih orang-orang itu saja. sehingga cemburu sosial itu karna gini orang-orang itu lagi yang menerima, ya gimana lagi, bahasanya gini dia berjasa kepada saya saya jadi kepala desa ya bahasanya saya tidak akan membuta kepada orang-orang itu, dan sampai sekarang."

"herannya dia kan sudah memiliki masa yang jadi pokok itu kan yang dari 568 anggota PKH, nah kalau satu keluarga sudah memiliki 2 suara misalnya berarti 1000 lebih nah itu terus belum kalo ada anaknya."

P : "setahu Bapak selain dari kader PKH ini, bagaimana kades menggaet suara baru ketika pilkades 2017 terutama yang non penerima PKH? "

N : "itu ada tim kesuksessan dia menjadi kepala desa itu dengan, nyuwun sewune lah sekarang sudah membudaya yang namanya suap menyuap bahasanya disini muwur amplop, itu menggunakan seperti itu dengan menggunakan uang yang bervariasi contoh misalnya ada yang satu Rp 75.000 ada yang Rp 100.000 kalo kades yang sekarang ini memang nominalnya paling besar Rp 150.000 kemarin."

P : "beliau meskipun masih menjabat tetap melakukan muwur itu Pak?"

N : "Iya betul, kemarin kan sempat didatangi dari kecamatan, polres, kodim, rapat sampe jam 3 pagi bahwa mereka saling menyepakati soal muwur, bagi duit, soal apa-soal apa ya pokoknya cara politik mereka lah yang intinya untuk mengkhalalkan segala cara guna meraih kepala desa. bahkan sampai dimana kontrak politik, kan gini dari dua orang ini akan menggulingkan satu orang dalam artian dua orang ini untuk memecahkan suara, jadi segala sesuatunya itu dibayarkan dari yang mengkontrak.."

P : "masalah seperti ini apakah semua orang tahu Pak?"

N : "tidak semua orang tahu hanya tim-tim sukses yang tahu."

P : "Sebetulnya pergerakan kampanye mereka ini seperti apa Pak?"

N : “Untuk RW 5 karena memang cenderung gini, pada pencalonan pertama (2012) ketika calon kandidat A kalah politik dengan B (yang sekarang menjabat) yang tim yang pertama menyukseskan kandidat A pada pemilihan pertama (2012) tidak dipakai lagi pada pemilihan kedua (2017), sehingga untuk RW 5 khususnya itu menggunakan strategi yang bahasanya itu unsur dendam kepada calon A nah disitu dimanfaatkan oleh timses B. Sehingga ketika itu dari timsesnya kandidat A berkampanye mendukung A tapi ketika membagi uangnya itu dari kandidat B, kenapa seperti itu karena terbukti hasil suara RW 05 mutlak mendukung kandidat B tapi kan juga karna nominalnya lebih besar kalo disini 150, kabarnya saya tidak tahu persis yang jelas itu 200-400 perorang.”

P : “kalo di luar wilayah RW 05 itu cara timsesnya berkampanye seperti apa Pak?”

N : “Itu sistemnya door to door untuk merekrut, jadi misalnya datang ke saya nah saya punya keluarga terus kemudian merekrut secara berantai. nanti mereka datang ke keluarga yang sekiranya paling berpengaruh.”

P : “Apakah ada iming-iming yang diberikan ketika perekrutan itu tadi Pak selain uang muwur itu?”

N : “Kalo selain uang ya itu terkait dengan bansos.”

P : “Kalo dari selain dua hal ini uang dan bansos, setahu Bapak apakah ada pendukung yang kemudian diberikan jabatan strategis atau proyek tertentu?”

N : “yang saya tahu disini itu ada Pak W yang dijadikan anak emas karena dirasa menyukseskan (kades) kemudian dia diberikan imbal jasa yang jelas, yang terbukti nyata dia itu Pak W dimasukan ke kelembagaan bagian penanganan proyek desa.”

P : “ Sebelum kades menjabat Pak W ini backgroundnya apa?”

N : “tadinya dia cuma ketua RT saja”

P : “nama lembaganya apa Pak?”

N : “saya kurang paham karena itu saya ga pernah ikut rapat dalam LP3M atau apalah itu.”

P : “proyek yang terbukti berjalan secara fisik apa saja Pak?”

N : “pembangunan jembatan, senderan, jalan setapak dari masing-masing RT”

P : “kalo pengairan tangki disini ada atau engga? atau pernah mendengar wacana tsb?”

N : “disini engga ada, kalo kemarin pernah terjadi gini jamban tapi satu dukuh ini dijadikan satu (septitank) cuma kan dari kades tidak berkenan tidak mau tanda tangan initinya lah akhirnya dilimpahkan ke argasoka.”

P : “alasannya tidak mau tanda tangan karena apa?”

N : “kalo tidak salah dia minta dari proyeknya itu 50% atau bagaimana lah.”

P : “presentase uangnya itu untuk siapa?”

N : “kayaknya si buat sendiri.”

N : “kalo terkait pengairan itu apa yang disebut panci mas sepertinya ya,”

N : “panci mas kan gini, panduan untuk pengadaan sarana air bersih (SAB) itu kita cari sumber mata air kemudian disalurkan ke pipa yang

mana pipanya disalurkan ke rumah-rumah, kalo panci mas itu memang ada pelaksanaannya di RW 04. karena masalah sarana air bersih itu di RW 04 kan kekurangan air bersih makanya diadakan air bersih."

N : "nah RW 04 dengan RW 05 itu kan bersebelahan cuman kan gini, untuk periode kedua pendukung terbesar ketika menjabat jadi kepala desa lagi itu RW 05. sedangkan RW nya sendiri pun di RW 03 sebenarnya masih kalah suara dengan Pak A ketinggalan banyak suara. Di RW 04 pun sama masih kalah suara, cuma kan dibombardir dari hasil suara RW 05. makanya kaya sekarang ini kadusnya kan Mas J, jadi untuk RW 05 segala sesuatu bantuan dari pemerintah contoh jambanisasi, RT-LH, dll itu kebanyakan jatuh kepada RW 05."

P : "kalo untuk RT-LH itu berapa banyak yang akhirnya mendapat pembangunan rumah?"

N : "dari periode dua ini, saya taunya di RW sini aja ya itu ada Pak S, dsb…."

P : "orang-orang yang terpilih ini mayoritas pendukung non-pendukung atau bagaimana?"

N : "itu mayoritas pendukung semuanya lah."

P : "kalau saya tanya pendapat Bapak sebagai pengamat bagaimana kinerjanya beliau sebagai seorang pemimpin di lingkup internal dan eksternal dalam artian pemimpin di lingkup perangkat dan pemimpin bagi masyarakat desa."

N : "kalau menurut saya sebagai penonton itu untuk kepemimpinan kepala desa yang sekarang ini tidak memenuhi secara pemerataan itu satu, dalam bentuk apapun baik segi pembangunan dan bantuan itu tidak memenuhi pemerataan. kemudian untuk desa Ampelsari ini dengan bagaimana pelayanannya kepada masyarakat itu selalu menyulitkan contohnya gini, saya mau membuat balik nama kepemelikikan itu dipersulit tapi bagaimana mereka-mereka yang mengajukan dari timnya sendiri itu dipermudah. sampai sekarang contoh kemarin, ada Pak M datang ke kantor desa dia akan membetulkan antara sertifikat dengan SPPT itu kalo di sertifikatnya itu 2000 sekian sedangkan di SPPT itu 5000 sekian, dia mengajukan siap memberikan 700rb asal perbedaan ini dibetulkan dan meminta kwitansi dari kepala desa akhirnya tidak diberi kemudian tidak diacc disitu dan kemudian dia ke notaris, notarisnya pun tidak mau berurusan dengan pemdes Ampelsari."

P : "ada alasan kenapa beliau tidak mau memberikan tanda tangan?"

N : "ya mungkin kan terkait dengan pemungutan biaya untuk membetulkan itu tadi kan butuh biaya ini itu. kalo kita telusuri ya sekedarnya orang yang bekerja diberi uang rokok atau bensin sebagai pengganti jasa tapi kalo disini ga sekedar waah ngerii. terkait administrasi dipersulit, terbaru juga soal balik nama SPPT, survey SPPT, belum sampai akhir bulan tapi sudah ditutup padahal harusnya sampai akhir bulan, tapi ya gitu kalo orangnya sendiri yang perlu ya tetap dilayani."

N : “kurang pemerataan ya kurang adil dan itu mementingkan kelompok pendukungnya sendiri.”

P : “ada penjelasan tidak Pak dari pemdes ataupun kades yang bersangkutan terkait transparansi pengusulan bansos itu”

N : “dari pemdes belum ada, contoh untuk prasarana umum lah kan selama dua periode ini saya mengusulkan senderan jalan di badan jalan dibangun agar tidak mengalami longsor atau gugur lah cuma sampai sekarang tidak di tanggapi. saya tanyakan ke Dispermades terkait asset desa itu hak mutlak kepada kepala desa tapi untuk Dana Desa (DD) ini kan harusnya ada pemerataan tapi cenderungnya intinya dia memikirkan orang-orang yang mendukung, tidak ada penjelasan sama sekali. intinya gini kalo usulan itu hanya masuk ke kantor desa tapi tidak masuk ke RPJMDes itu tidak akan diacc penjelasannya itu dari situ semua.. contoh pengusulan RT-LH kalo dating cuma usul bawa KTP tidak akan diacc kemarin saya ke desa untuk usul terus dari perangkat menyampaikan “jangan bawa KTP aja tapi sekalian sama foto rumah sebagai bukti, biar nanti masuk RPJMDes entah nanti cairnya kapan kalau belum masuk RPJMDes tidak akan diacc.”

P : “tapi ada edukasi kepada RT tidak Pak untuk tata cara pengusulan seperti itu? dan mestinya kan ada pembahasan bersama sebelum masuk RPJMDes nggih”

N : “ketua RT tidak diberi tahu cara-caranya, untuk masuk ke RPJMDes berarti nanti ada rapat kepala desa, BPD, dan perangkat kan. kemarin saja ada itu alasan karena pandemi, saya usul untuk buat bank sampah tapi gagal padahal sudah ketok palu masuk ke RPJMDes, alasannya karena dana dialihkan ke pandemi dalam bentuk BLT.”

P : “terkait dengan BLT covid itu pemerataannya bagaimana?”

N : “untuk BLT covid ini memang yang menerima non-PKH jadi memang untuk orang lain, tetapi dominan yang punya hubungan kekeluargaan. contoh kan nanti yang memutuskan kadus setempat, dari RT sudah mengusulkan warga-warganya, kemudian dirapatkan dengan BPD, kades dan perangkatnya. kemudian ini akan antaranya kepala desa dengan kadus setempat untuk BLT Covid. karena pernah terjadi gini saya mendatangi ketua BPD nya saya mengusulkan warganya, Alhamdulillah diacc disitu dan dirapatkan dan dinyatakan InsyaAllah akan segera mendapat BLT. tetapi disana ada perubahan lah perubahan itu intern datang dari kadus dan kades, kadang bisa jadi ya kadusnya yang mbuang (membuang nama-nama tertentu) ya kadang kadesnya yang mbuang yang disenangi lah (warga yang dipilih).”

P : “kalo terkait capaian atau inovasi selama kepemimpinan beliau, mungkin dari faktor ekonomi angka kemiskinan misalnya”

N : “masalah hal itu, selama ini upaya untuk mengentaskan satu pengangguran dan kedua kemiskinan dari saya yang selama 2 tahun kegiatan di kantor desa belum ada. contoh gini Mba, ini kana ada warung bebek goreng dari situ kenapa kita mendaftarkan infrastruktur seperti itu kan untuk mengembangkan desa, kami dari karang taruna mengusulkan

wisata kampung tapi selama ini ga pernah diacc, kemudian itu gedung-gedung di belakang kantor desa yang terbengkalai itu saya sudah komunikasikan dengan yang lain, untuk mengentaskan kemiskinan kita bergabung dengan PT.Idep yang di Blambangan. nanti dari sana bisa memanfaatkan tempat dengan memakai orang-orang disini. contoh lagi BUMDES udah ada pun tapi sampai sekarang ditanyakan hasilnya ga ada, transparansi uang juga ga ada. kemarin yang sudah terjadi Ampelsari Cup, dari situ kita berkesimpulan bahwasanya kepala desa ini semua serba uang makanya dia jadi komersil. karena mengadakan acarapun lapangannya suruh disewa, sedangkan lapangan punya kita, kalo perawatan oke lah tapi disuruh sewa mau ga mau 5jt cuma kalo rusak ditanggung panitia harus dibetulkan panitia, sedangkan waktu ditanya 5jt ini untuk apa jawabnya untuk perawatan lah kalo perawatan ya panitia ga perlu disuruh melakukan perawatan lagi kalo rusak."

P : "panitianya dari siapa saja Pak?"

N : "dari kepemudaan, intinya ga ada transparansi. terus masalah parkiran kan parkir sudah dikontrak selama open cup tersebut ternyata pada akhirnya hasil parkir masuk ke desa."

P : "kegiatan Ampelsari Cup ini pesertanya dari siapa saja apa khusus untuk warga Ampelsari? inisiatif dari siapa ide ini?"

N : "pesertanya diluar warga Ampelsari, undangan ke berbagai daerah. pencetusnya dari kepemudaan salah satu dari kita Pak M yang tujuannya untuk mempersatukan kepemudaan Ampelsari dengan adanya Ampelsari open cup Alhamdulillah seluruh kepemudaan punya kegiatan silaturahmi berkelanjutan."

P : "tetapi untuk kedepannya pengelolaan BUMDES ini bagaimana?"

N : "saya tidak tahu persis bagaimana, kalo keinginannya dari karang taruna si biar karang taruna saja yang mengelola dan pemdes tidak perlu ikut campur tetapi sampai sekarang belum diserahkan pengelolaannya."

P : "berarti dapat dikatakan tidak ada program yang brilliant dari periode sekarang?"

N : "yang terakhir dicanangkan itu katanya kalo ada pembelian tanah diusahakan tidak ada *polo goro*. *polo goro* kan gini kalo ada orang yang menjual tanah disaksikan oleh perangkat desa la itu ada biaya untuk *polo goro* (perangkatnya)."

P : "kalo menurut Bapak faktor apa yang menyebabkan suara pemilihnya bertambah?"

N : "bertambah itu karena dia mengajukan bantuan dan program-program dari pemerintah itu lah dimanfaatkan beliau untuk mencari orang supaya mendukung dia. dengan iming-iming kalo memilih dia nanti bisa lah itu dapat bantuan."

P : "menjelang pemilu kades 2017 berarti sudah mulai terlihat bentuk strateginya seperti apa ya Pak, pergerakan untuk perekrutan timses ini apa hanya mengandalkan kader saja atau bagaimana?"

N : "ya melalui kader, juga melalui ketua RT yang berkenan jadi tim."

P : “kalo berbicara soal politik desa apakah hal-hal yang diceritakan tadi (politik uang, pejabat yang korup) sudah terjadi sejak lama?”

N : “kenapa Ampelsari jadi desa termiskin se Kab Banjarnegara ya karena pola orangnya, kepala desa dan perangkatnya sama. kita ambil saja dari masalah bansos PKH tapi pihak desa tidak mau kalah akhirnya uang tsb dialihkan ke sembako. sedangkan sembako per satu kepala itu 20/25rb kali 568 itu kan sudah banyak. tetapi kebanyakan setelah pembagian sembako PKH itu kadang-kadang perangkat makan-makan bareng dimana lah. kaya pengaspalan kemarin lah ini kan jadi aspirasi, masuk 200jt dari 20%nya masuk untuk anggota dewannya, terus ke tendernya 110jt, jadi 130 lah keluarnya yang jadi pertanyaan 70jt ini kemana. pokoknya yang jelas tidak amanah, kecuali disini kepala desa dan perangkatnya itu diganti semua.”

P : “kalo daya tarik dari kades ketika mencalonkan diri pertama kali di 2012 itu karena faktor apa? apakah popularitas atau memang banyak berperan di desa?”

N : “belum, itu karena dari alm ayahnya B. mulai dari kades S dan dia (kades) sekarang ini orang yang sukses diajukan oleh B. bahasanya gini S itu diajukan oleh B sebagai kades yang nantinya jadi boneka politik, dengan politiknya B itu menjadikan S kades selagi mempersiapkan anaknya (kades sekarang) untuk maju ketika masa pendidikannya telah selesai. kalo dikatakan berperan pada desa sebelumnya (kades sekarang) itu tidak, kalau tidak menjaga karirnya orang tua sebagai haji dan imam masjid ya beliau orang yang biasa saja tidak menonjol.”

N : “B membuat S menjadi kades, kemudian setelahnya (S) menarik kerabatnya menjadi perangkat desa sehingga kesan pemerintahan desa Ampelsari yang diinginkan oleh B ya itu dari keluarganya sendiri.”

P : “kalo boleh tau B itu tokoh masyarkat atau bagaimana? sehingga menjadikan beliau popular diantara warga desa?”

N : “dia itu bukan tokoh masyarakat cuma dia itu kan pengaruhnya sebagai orang terkaya di desa Ampel jadi bahasanya gini dengan uang segala sesuatunya beres, ya karena banyak uang.”

P : “hmm berarti karena popularitas utama ayahnya (B) ini cukup kuat ya Pak?”

N : “iya B dikenal sebagai juragan sapi itu aja, karena apa disaat dia menjadikan S dan kades sekarang ini menjabat itu dengan uang. itu awal daripada Ampelsari calon kepala desa menggunakan uang.”

P : “sebelum S dicalonkan itu berarti tidak ada muwur Pak?”

N : “tidak ada, persis saat menjelang pencalonan S.”

N : “.. dari situlah sampai sekarang jadi membudaya muwur itu.”

P : “ini bisa dipastikan bahwa memang betul ketika masih menjabat pun kades tetap membagikan muwur?”

N : “iya, namanya politik lah ya. bahasanya gini saya tidak mau tahu yang penting sukses, cuci tangan lah ya terserah bagaimana yang penting sukses. jadi yang menjadi ujung tombak ya orang-orang timsesnya.”

Nama : (Inisial) S
Ket : Warga Desa
Tempat : Rumah Narasumber
Hari, tgl : Kamis, 2 Februari 2023

P : “Menjelang pilkades itu gambarannya seperti apa?”

N : “Yang terakhir itu pendekatannya kunjungan-kunjungan ke warga, dulu kan ada program pembangunan rumah untuk yang membutuhkan nah itu dikunjungi beberapa yang sekiranya membutuhkan, si memang tidak semua. Dulu kan katanya mau ada pembangunan rumah, ada ini itu tapi kenyataannya beberapa aja.”

P : “Kriteria yang akan direnov seperti apa? kemudian penerima bantuan renov rumah itu apakah memang benar-benar butuh atau malah orang-orang yang akrab dengan Ibu kades”

N : “Ya, mungkin ada yang seperti itu cuma satu dua mungkin, intinya tidak semua yang ada hubungan. Mungkin yang diutamakan yang pro begitu.”

P : “Bentuk kampanye seperti apa? adakah orang-orang timses disini?”

N : “Dulu kan kotak suara itu memang per rw jadi hasil suaranya memang sangat terlihat mana daerah yang pro atau tidak, memang kalo disini si suaranya ada tapi tidak memenangkan beliau.”

P : “Kondisi ekonomi masyarakat seperti apa, mayoritas pekerjaannya apa?”

N : “Mayoritas berjualan dipasar pedagang kecil-menengah, dan ibu-ibunya kebanyakan Ibu rumah tangga”.

P : “Berkaitan dengan bansos apakah hal sensistif disini, adakah kecemburuan satu sama lain”

N : “Kecemburuan sosial sudah pasti banyak, karena kadang tidak tepat sasaran antara satu dan yang lain saling ngomongin.”

P : “Faktornya tidak tepat sasaran karena apa Bu?”

N : “Gak tau sih, tapi kalo ditanya itu karena data dari atas. Karena dari sini sudah mengajukan pun yang keluar ini ini aja dan jawabannya itu ngikut hasil data dari atas.”

P : “Upaya dari pemerintah desa seperti apa untuk yang belum menerima bansos?”

N : “Sepengetahuan saya itu bantuan waktu covid ada.”

P : “Ibu sebelumnya pernah jadi kader PKH?”

N : “Engga saya kader posyandu, cuma waktu itu saya pernah dapet PKH 2 tahun dan ditunjuk jadi ketua kelompok tetapi sekarang bantuannya sudah ga berlanjut lagi katanya datanya memang udah ga ada.”

P : “Selama menjadi ketua Ibu termasuk orang yang mengusulkan nama-nama penerima sebelum dibahas ke musrenbangdes tidak?”

N : “Kalau saya tidak, itu yang biasanya mengusulkan dari RT dan kerjasama dengan pendamping. Sebagai ketua saya hanya memimpin pertemuan kan kadang ada pembelajaran dsb gitu.”

P : “Ibu sama sekali gatau soal pengusulan nama itu?”

N : “Paling kadang memang dari RT suruh mengusulkan yang sekiranya membutuhkan, tetapi masalah keluarnya siapa saja itu kan urusannya pemerintah desa.”

P : “Ibu pernah mengikuti musrenbangdes? Bagaimana proses pengusulan namanya disitu?”

N : “Kadang sudah dirinci apa saja, paling ditanyakan mau mengusulkan apalagi untuk tahun depan. Kalo sekiranya tentang layak atau tidaknya itu saya kurang paham, mungkin itu bisa jadi dari pimpinan musren.”

P : “Menurut pandangannya Ibu bila dinilai mayoritas distribusi bansos itu sudah tepat sasaran belum?”

N : “Iya si kebanyak sudah, tapi ada beberapa yang belum tepat.”

P : “Saya ingin tanya pendapatnya Ibu soal kinerjanya kades selama ini bagaimana? Jujur saja tidak akan jadi masalah Bu.”

N : “Menurut saya si kurang maksimal dari cara kerjanya, karena ada kecenderungan beliau lebih condong ke orang yang dekat.”

P : “Bagaimana Ibu bisa menyimpulkan demikian apakah ada contohnya seperti apa?”

N : “Sesimpel masalah pelayanan, kalo ke orang yang dulunya mendukung beliau jadi lebih ramah tapi mungkin kalo dari masyarakat yang bukan pendukung jadi kurang.”

P : “Apakah ada perbedaan kalo soal pembangunan di wilayah tertentu, khususnya RW atas yang memiliki pendukung lebih banyak dibandingkan di sekitar sini?”

N : “Iya kalo ke dusun-dusun lain lebih ya, tapi kalo sekarang-sekarang ini sudah lebih baik, lebih aktif datang ke sini. Karena dulu sempat ada konflik dengan pemuda disini soal pendukung itu tapi kurang tau persis saya, tapi belakangan sudah lebih rukun.”

P : “Dari pengamatan saya Ibu termasuk orang yang netral atau tidak mendukung?”

N : “Saya si netral aja, mau gimana lagi orang kadesnya dia yang terpilih ya sudah. Saya maunya milih pemimpin itu berdasar dari keinginan hati saya, jadi saya tidak mau nge-*block*.”

P : “Selama menjadi kades ini adakah program atau inovasi yang sangat berdampka untuk masyarakat atau desa, misalnya pembangunan fasilitas tempat ibadah, mungkin di dusun ini?”

N : “Kalo untuk RW sini engga ada si. Kemarin si pas pertemuan intinya membahas soal jamban tapi kelanjutannya bagaimana tidak tahu. Karena kalo jamban sehat sini masih kurang.”

P : “Apa disini ada pengairan yang dibiayai oleh pemdes seperti panci mas di RW 04 Bu?”

N : “Pengairan disini mandiri, dari warga itu iuran untuk membuat tempat penampung terus nanti disalurkan ke warga. Sini paling mengusulkannya tempat pembuangan sampah tapi belum.”

P : “Dari semenjak periode pertama apa dusun ini belum menerima pembangunan atau bantuan tertentu untuk wilayah satu dusun atau RW?”

N : “Iya pernah si, dulu ada pembuatan talu, jalan-jalan setapak.”

P : “Menyoal tadi strategi beliau yang lebih kepada pendekatan jemput bola dikunjungi satu-satu warganya, ketika meminta doa restu apakah disampaikan secara langsung maksud dan niatnya atau bagaimana?”

N : “Soal yang dikunjungi untuk dimintai doa restu itu ke orang-orang yang tua (sesepuh), dan disampaikan minta doa restunya mau maju nyalon gitu. Kalo ke yang muda engga satu persatu gitu, pemuda sini juga condongnya ke calon yang lain.”

P : “Kalo wilayah yang menjadi pendukung kuatnya beliau di daerah mana?”

N : “Daerah atas wilayah RW 05, 04 dan sekitarnya.”

P : “Sepengetahuan Ibu *nggih* kenapa beliau mencalonkan diri menjadi kepala desa, apa sebelumya aktif di kemasyarakatan atau bagaimana?”

N : “Kalo itu engga tahu.”

P : “Apa juga karen keluarganya yang terkenal di masyarakat ya Bu?”

N : “Ya mungkin orangtuanya.”

P : “Apa orangtuanya pernah jadi kepala desa atau perangkat desa?”

N : “Tidak, Cuma keluarganya pengusaha dan termasuk orang kaya ya di desa.”

P : “Yang Ibu ketahui soal beliau secara pribadi itu karakternya seperti apa?”

N : “Iya secara pribadi ramah, tetapi jujur dari penampilannya kadang kurang pantas ya memang betul itu kembali ke diri masing-masing cuma kan dia sebagai orang yang utama pasti dipandang dan diperhatikan orang-orang.”

P : “Kalo dari kemampuan, kompetensi, kecerdasan itu bagaimana?’ N : “Sepertinya kurang ya, adilnya juga kurang.”

P : “Tidak apa-apa Ibu, wajar orang menilai positif dan negatif. Tetapi kalo menurut Ibu sisi positifnya beliau apa?”

N : “Apa si ya, ramah mungkin dan pembangunannya jalan.”

P : “Kalo saya nanya harapannya Ibu sebagai warga desa, keinginannya memiliki harapan pemimpin desa yang bagaimana?”

N : “Intinya yang merakyat kepada masyarakat, jangan yang mem-*block*, terus menjadi sosok pemimpin yang tauladan, mohon maaf lebih ke agama yang kuat. Meskipun itu juga urusan masing-masing ya soal agama, tetapi menurut saya akan lebih pantas kalo dia paham agama kan pasti sikapnya baik bertanggungjawab dan bisa ditauladani.”

P : “Dulu sebelum Ibu menerima PKH sampai akhirnya menerima prosesnya bagaimana, apakah Ibu mengusulkan secara mandiri ke RT?”

N : “Engga, dulu saya masih satu rumah dengan orangtua dan memang orangtua dulu menerima PKH. Terus saya dapet undangan dari Jakarta katanya nama saya tertera sebagai penerima, dan kebetulan anak saya sudah masuk sekolah saat itu sedangkan orangtua saya sudah tidak membiayai anak yang sekolah. Tiba-tiba saya dipanggil sebagai penerima. Ibaratnya saya dapet karena turunan dari orangtua. Cuma itu tidak berlangsung seterusnya, hanya dua tahun.”

P : “Bentuk bantuannya nominal uang?”

N : “Iya, biasanya kalo SD 450/pertahun, SMP 750, terus SMA sekarang tidak tahu.”

P : “Warga satu Desa Ampelsari itu banyak ya Bu?”

N : “Banyak, yang dapet bantuan aja sampai 600an.”

P : “Itu bantuan jenis apa Bu? Apa PKH semua?”

N : “Itu dari bansos campuran, kalo yang penerima PKH itu seringnya dapet bansos sembako juga. Dulu kalo ada pengumuman penerima itu kan diposting per desa berapa-berapa, lah Ampelsari itu memang paling banyak dibandigkan yang lain.”

P : “Menurut pandangan Ibu memang masih banyak yang membutuhkan, atau sebaliknya sebenarnya tidak butuh tapi menerima?”

N : “Iya itu ada, dan sebagian orang yang kurang sadar diri misal mampu secara ekonomi tetapi tidak mau mengundurkan diri .”

P : “Kasusnya seperti itu tindak lanjutnya bagaimana Bu?”

N : “Itu nanti tergantung pendamping PKH agar dibantu mengundurkan diri biasanya.”

P : “Penerima yang demikian tidak mau mengundurkan diri apa bansos nya dibiarkan berlanjut tetap menerima?”

N : “Iya ada, biasanya gini dulu saya sering disuruh untuk mendata harta dan kepemilikan calon penerima, misal saya ditanyai punya tabungan lebih dari lima juta dan memiliki emas atau tidak pasti jawabnya tidak padahal ya saya tahu sebenarnya itu orang punya.”

P : “Terus Ibu melaporkan ke PKH nya seperti apa?”

N : “Iya dilaporkan saja apa adanya. Pernah ada nama-nama penerima yang keluar terus minta tolong dikunjungi dan diberi informasi kondisi ekonominya gimana ya saya menceritakan. Kriterianya bagaimna pendamping yang memutuskan. Saya tidak berani mengatakan dia mampu atau tidak itu biar pendamping aja yang memutuskan yang penting saya sudah menceritakan kondisinya menurut pandangan saya.”

P : “Jadi kader PKH itu harus orang yang netral ya Bu.”

N : “Iya. Ini saya cerita berdasar pengalaman ya ada penerima PKH ya rumahnya memang sudah bagus dipandang dari luar memang tidak layak dan menurut pendamping juga tidak layak. Tapi sebetulnya suaminya meninggal saya merasa iba dan saya bicarakan lagi dengan pendamping. Akhirnya tetap tidak dapet PKH meskipun ada anak bersekolah, menerimanya bansos sembako. Jadi ya begitu, misal pendamping sudah mengusahakan pun dari pusat bisa tetap mental.”

P : “Iya bergantung dari pemerintah pusat ya Bu untuk pemutusan akhir layak menerima atau tidak.”

N : “Iya betul. Sebenarnya menurut saya programnya si sudah bagus karena tiap pertemuan itu ada materi, ada ilmu yang diajarkan buat Ibu-Ibu kelompok PKH ya maksudnya untuk meningkatkan keterampilan ekonomi juga kan. Tapi banyak yang kurang kesadaran jadi berangkat untuk formalitas. Dalam hati saya jadi merasa kasihan ke pemerintah kalo penerimanya bansosnya menyepelekan. Apalagi yang tidak tepat sasaran itu.”

Nama : (Inisial) P
Ket : Warga Desa
Tempat : Rumah Narasumber
Hari, tgl : Rabu, 29 April 2023

P : “Apakah saudari pernah menerima bantuan tetap semacam PKH?”
N : “Sama sekali saya belum pernah menerima bantuan baik untuk anak sekolah atau sembako itu engga pernah.”
P : “Apakah ada upaya untuk menggusulkan baik dari saudari maupun dari ketua RT?”
N : “Kalo ke RT ya udah tapi ya nyatanya seperti ini sampai sekarang belum menerima apapun, bertahun-tahun dari anak saya TK sampai sekarang SMA engga pernah menerima bantuan seperti PKH atau sembako.”
P : “Kalau soal bantuan covid apa juga belum pernah menerima sama sekali?”
N : “Waktu masih covid pernah menerima selama tiga bulan.”
P : “Selain dari bantuan covid bantuan sosial apalagi yang pernah diterima?”
N : “Selain covid engga pernah.”
P : “Bantuan dari jenis posyandu untuk anak-anak atau posyandu lansia apabila saudari memilliki orang tua, apakah menerima?”
N : “Untuk anak saya engga ada, orang tua juga tidak karena hanya tinggal dengan anak dan suami.”
P : “Suami saudari kerja apa? Dimana?”
N : “Kerja ikut proyek, ya kadang di Banjarnegara sekarang lagi di Purwokerto seadanya pekerjaan.”
P : “Saudari putranya berapa? Yang masih bersekolah siapa saja?”
N : “Anak saya tiga yang pertama SMK, kedua SMP dan ketiga balita. Tetapi keduanya yang bersekolah tidak menerima bantuan apapun jadi buat saya mau lurah (kepala desa) seperti apa rasanya sudah terlanjur kurang percaya.”
P : “Kalau sebelum kepala desanya M apakah ada bantuan yang diterima?”
N : “Engga karena sebelum M anak saya belum bersekolah, ketika kadesnya M anak saya TK dan dari sejak saat itu sampai sekarang belum pernah menerima bantuan. Dari pihak sekolah pun tidak ada keringanan ya karena tidak ada rekomendasi dari desa kalo saya dan keluarga pantas menerima bantuan, jadi KIP KIS saya tidak punya sama sekali.”
P : “Saya ingin bertanya soal evaluasi kinerja kepala desa M selama menjabat dua periode ini, maka saran dan kritik apa yang ingin saudari sampaikan dari keresahan yang dirasakan?”
N : “Saya tidak dekat ya jadi mau ditanya seperti itu tidak bisa menilai mungkin orang lain bisa banyak berpendapat, tapi kalo saya ya intinya kurang percaya itu saja. Karena pernah rumah saya di survey langsung oleh kadus dan kepala desa M sebagai kandidat penerima bantuan RT-LH, tetapi sampai sekarang tidak keluar bantuan malah orang lain yang menerima.”

P : “Apakah ada penjelasan kenapa prosesnya tidak berjalan atau saudari menjadi tidak layak menerima karena alasan apa?”

N : “Tidak ada keterangan apapun.”

P : “Kemudian ketika menjelang pemilihan pendekatan dari kades M kepada masyarakat seperti apa? Apakah ada indikasi politik uang yang dilakukan?”

N : “Kebanyakan ya sudah begitu sekarang, tidah hanya beliau si. Intinya ya pakai politik uang tidak mungkin tidak.”

P : “Kalau yang saya tangkap sejauh ini saudari bukan termasuk pendukung kades M apakah betul?”

N : “Iya bukan, waktu pemilihan kemarin ada kandidat P yang masih saudara jauh saya jadi ya sebagai saudara saya mendukung P.”

P : Menurut saudari karena Anda bukan pendukung kades M itu menjadi salah satu faktor tidak menerima bantuan bukan?”

N : “Hmm karena sebetulnya dari awal beliau maju mencalonkan diri jadi kades saya memang bukan pendukung, jadi bukan hanya di pemilihan kemarin saja tapi dari awal saya tidak memilih M.”

P : “Menurut saudari yang seperti Anda bukan pendukung dan tidak menerima bantuan apakah cukup banyak?”

N : “Saya tidak tahu. Katanya kan bantuan sosial itu berdasar data dari pemerintah pusat jadi ya sudah lah yang penting rezeki keluarga saya cukup.”

P : “Kalau menjelang pemiliha kepala desa persaingan antar calon dan antar pendukung di lingkungan itu terlihat sengit atau bagaimana?”

N : “Sejauh ini saya rasa aman aman saja, ya namanya milih itu kan hak masing-masing orang jadi ya biasa-biasa aja antar warga.”

P : “Harapan Anda terhadap kepala desa mendatang yang terpilih di pemilihan 2024 seperti apa?”

N : “Semoga ya lebih bermasyarakat, terus lebih bertoleransi.”

Nama Narasumber I : (Inisial) O
Nama Narasumber II : (Inisial) N
Tempat : Rumah narasumber
Tanggal : 29 Maret 2023

P : "Mohon maaf Ibu dan Bapak saya ingin bertanya kalau boleh tau pekerjaan Bapak dan Ibu dibidang apa?"
O : "Swasta lah, kalau saya kerja di kelapa sawit Kalimantan tapi sekarang lagi pulang."
P : "Ibu dan Bapak putranya (anak) berapa? Apa masih ada yang sekolah?"
O : "Anak tiga, masih ada yang sekolah. Kalo yang pertama sudah menikah, tinggal dua tapi yang satu tidak sekolah."
P : "Mohon maaf saya langsung ke pertanyaan ini terkait bansos, apa Bapak atau Ibu termasuk keluarga yang menerima bantuan *mboten?"*
O : "Engga pernah."
P : "Tapi sudah pernah mengusulkan ke RT atau ke desa?"
O : "Katanya si sudah coba diusulkan tapi enggga bisa karena saya ikut Jamsostek mandiri dan katanya saya pakai BPJS yang prabayar padahal sini si engga pernah pakai itu tapi di sistem tercantum seperti itu."
P : "Kalau atas nama Bapak kan belum tercantum *nggih* apa pernah coba diusulkan juga?"
N : "Engga si sejauh ini."
P : "Kalau begitu saya ingin bertanya soal masa kepemimpinan kades selama dua periode ini menurut Bapak dan Ibu bagaimana peran beliau selama menjabat?"
O : "Iya menurut saya si baik si, tapi kalau masalah bantuan itu tidak dilihat langsung orang-orangnya pekerjaannya apa jadi yang menerima itu yang masih saudaranya perangkat desa, entah saudara kadusnya dsb itu kebanyakan dapet. Kalau yang jauh yaa engga."
P : "Berarti yang memiliki hubungan dengan orang di desa ya Bu?"
O : "Iya yang memiliki hubungan."
P : "Ibu dan Bapak tidak memiliki hubungan dekat dengan salah satu orang di pemerintahan desa? Kalau secara pribadi kenal dengan kades tidak?"
O : "Engga ada, kalau kenal kades engga juga biasa aja sekedar tahu."
P : "Kalau begitu cara kampanye beliau ketika menjelang pemilihan seperti apa?"
O : "Engga tahu persis si mba, cuma kan semua orang pakai uang ya."
P : "Di wilayah RT ini termasuk banyak yang menerima politik uang tersebut tidak sepengetahuan Ibu?"
O : "Iya banyak-banyak yang menerima."
P : "Sepengetahuan saya juga ada perekrutan istilahnya ajakan untuk menjadi timses apa keluarga disini termasuk yang menjadi target untuk ditarik menjadi timses?"
O : "Engga, keluarga disini engga ada."
P : "Kalo boleh tau apakah Ibu dan Bapak termasuk pemilih kades M di pemilihan yang lalu?"

N : “Kalau saya pribadi memang ikut memilih beliau, di kedua periodenya.”

O : “Kalau saya engga si.”

P : “Saya boleh tau Pak alasannya Bapak memilih beliau?”

N : “Karena saya kan secara lahir batin lah milih, bukan karena uang jadi milih kan gitu.”

P : “Saya dengar cerita dari beberapa orang ada kabar beliau ingin mencalonkan diri kembali di tahun mendatang, apakah Bapak/Ibu masih tertarik untuk mendukung kembali?”

N : “Iya kalo misalkan aturannya boleh seperti itu ya sudah gapapa. Cuma intinya kan gini mba, satu desa Ampel ini banyak yang menerima bansos, bukannya saya mengharapkan masalah bantuan. Tetapi intinya kan harapannya bisa merata, satu Ampel itu cuma berapa orang yang engga menerima mayoritas menerima semua. Saya juga dengar dimana-mana itu memang Ampelsari yang paling banyak menerima bantuan.”

P : “Yang engga menerima itu jadi terlihat jelas siapa-siapa saja ya Pak, karena mayoritas menerima.”

O : “Mampu tidak mampu itu dapet kalo masih punya kerabat di pemdes.”

P : “Mohon maaf Ibu tapi apakah yang berpandangan seperti Ibu cukup banyak, atau hanya pendapat pribadi saja yang menyimpulkan bahwa yang punya kerabat itu kebanyakan menerima bantuan.”

O : “Iya kadang kaya gitu tapi dibelakang gatau ya.”

P : “Kalau bantuan Covid kemarin apakah menerima atau tidak Bu?”

O : “Itu yang dari provinsi itu ya dapet berkala lima kali.”

P : “Selain dari itu mungkin bantuan untuk balita di posyandu, PKH atau sembako belum pernah Bu?”

O : “PKH sama non-PKH apapun ga pernah, yang sembako atau RTLH itu buat rumah pokoknya engga pernah.”

P : “Termasuk bantuan modal usaha untuk pedagang Bapak/Ibu tidak menerima? Barangkali bisa dicoba.”

O : “Kalau Bapak karena lebih sering merantau jadi engga, saya juga engga menerima karena RT nya udah coba tapi katanya mental terus di sistem ya itu kendalanya sama karena BPJS. Itu waktu anak saya lahiran mau pakai BPJS yang gratis juga gabisa.”

P : “Saya simpulkan harapannya Ibu dan Bapak terkait evaluasi kades untuk kedepannya lebih ke pemerataan bansos ya Ibu/Bapak?”

O : “Iya lebih baik lagi, disaring lah yang mampu dan tidak mampu ditinjau disini banyak yang sudah mampu masa dapet yang engga mampu malah engga dapet. Kalau saya disini ya mungkin kelihatannya rumahnya sudah kuat tapi kalau kaya saya engga merantau ya engga mungkin bisa bangun rumah karena ga punya kebun paling engga harus merantau biar dapet penghasilan karena engga dagang juga.”

P : “Kalo saran dan kritik untuk masalah pelayanan, pembangunan seperti itu apa dari Ibu/Bapak ada keluhan?”

O : “Iya semuanya diperbaiki lah, kepemimpinannya diperbaiki semua. Kalo pengajian itu lebih sering nyuruhnya perangkatnya untuk

mewakilkan, kalo disini kan sering ada pengajian diundang tapi jarang. Mungkin kalo ada kemauan baru dateng."

P : "Mungkin termasuk salah satu pendekatan menjelang pemilihan ya Bu, kalo selain dari hadir ke pengajian pendekatan lain ke masyarakat seperti apa?"

O : "Saya kurang paham mba, soalnya juga engga pernah tatap muka langsung. Datang ke rumah juga beberapa aja engga semua kalo timses itu kerumah-rumah."

P : "Masalah pelayanan di desa apa ada kesulitan atau keluhan sulit mengurus kepentingan dari pengalaman Bapak/Ibu?"

O : "Engga si biasa aja."

P : "Kalo soal pembangunan jalan-jalan di desa apa itu berjalan baik menurut Bapak/Ibu?"

O : "Jalan sama penerangan si lumayan bagus sampai ke pinggiran sungai juga dapat itu."

P : "Saya ingin tahu ini berdasar pemilihan kedua yang pasti kades memiliki pendukung tetap dan mungkin bertambah juga lebih banyak, menurut bapak/ibu sebagai warga faktor orang-orang desa kembali memilih beliau karena apa?"

O : "Mungkin juga karena materinya kuat, ada lawannya dulu Pak I kalah dua kali melawan beliau salah satunya karena materi ya beliau (kades) kuat si."

P : "Tapi kalo menurut potensi sebagai pemimpin bagaimana?"

O : "Kalo potensi si ya kebanyakan lebih bagus pemimpin itu laki-laki ya mba, entah nanti kedepannya bagaiman.?"

P : "Mungkin selain dari materi ada hal lain yang mendukung apakah popularitas keluarganya termasuk?"

O : "Iya pengaruhnya kuat banget itu keluarganya."

P : "Pengaruh yang seperti apa Ibu?"

N : "Pengusaha itu keluarganya sampai sekarang."

P : "Selain dari peran sebagai pengusaha faktor lain mungkin apakah bapak, ibu, atau kakaknya berperan banyak di kemasyarakatan desa?"

N : "Kalau soal itu saya kurang bisa memahami karena kami jauh dari wilayah rumahnya."

P : "Yang saya dengar alm. Bapaknya salah satu Kiai (ustad) apa itu betul Pak?"

N : "Iya itu ustad."

P : "Dari bapak apa ada harapan misalnya tahun depan beliau mencalonkan diri kembali?"

N : "Kalo misal kades mau maju lagi, saya harap jalanan itu yang depan RT kan hancur semoga ya bisa diperbaiki. Karena kalo warga mau benerin bisa aja tapi kan itu jalan umum semoga ada pembicaraan kesana."

P : "Iya iya Pak, tapi kalau jalan-jalan yang lain termasuk daerah Petambakan pembangunannya apa masih terbengkalai?"

O : "Itu malah jalan baru tadinya memang lama terbengkalai."

P : “Soal persaingan menjelang pemilihan sikap warga yang berbeda kubu itu bagaimana apakah terlihat sengit?”

O : “Iya paling ngomong-ngomong di belakang aja.”

N : “Saya si jujur aja ya mba, kemarin ada uang rokok dan segala macam saya dikasih dari semuanya ya memang saya terima tapi saya cuma nyoblosnya kades M, keluarga saya memang milih beliau.”

P : “Semua calon memberi Pak?”

N : “Iya itu semuanya.”

P : “Ada tidak kandidat yang nyalon tidak menyebar amplop atau uang rokok seperti itu?”

O : “Semenjak kades M itu si selalu pakai ya, saya juga orang pindahan baru pernah nyoblos pemilihan waktu M itu aja engga tahu kalo sebelumnya bagaimana.”

N : “Ada si satu orang dulu nyalon engga pakai sebelumnya ini itu memang orangnya baik bagus.”

P : “Selain dari uang ad aiming-iming materi lain yang diberi mungkin dari calon A, calon B dan yang lainnya?”

N : “Itu sudah pasti mba, makanya waktu kemarin dikasih saya terima semuanya tapi saya tetap milih M.”

P : “Selain dari materi, non-materi apa ada Pak mungkin cerita dari orang-orang?”

N : “Saya belum tahu soal itu karena kan saya jarang di rumah lebih sering di perantauan.”

P : “Terakhir saya ingin mengkonfirmasi menurut data dan juga cerita narasumber yang lain penerima bansos di sini cukup banyak, sebetulnya realitanya apa memang masih banyak warga yang ekonominya mohon maaf menengah kebawah atau sebaliknya banyak yang sudah mampu tapi tetap menerima?”

O : “Kurang survej aja lah karena banyak yang sudah mampu, kebanyakan malah orang yang mampu. Engga layak dapet kalau masih ada saudara sama orang desa (perangkat) ya dapat.”

Nama : (Inisial) M
Ket : Warga Desa
Tempat : Rumah Narasumber
Hari, tgl : Kamis, 26 Januari 2023

P : "Menurut Ibu bagaimana penyaluran bansos di Ampelsari apakah sudah merata?"

N : "Hampir semua masyarakat sekarang dapat bansos, semenjak kepala desanya beliau pembagiannya adil dan merata. Alhamdulillah kebanyakan tepat sasaran meski orang baru pun ditanyain, jadi setiap pertemuan ada informasi ada kuota bansos sekian-sekian tolong diinfokan ke kader untuk medata orang-orang yang belum pernah mendapat bansos, kita sebagai kader mengamati dan memperhatikan warga sekitar siapa saja yang belum dapet kalau ada yang layak didata terus yang sudah mampu diberi tahu untuk bergantian dengan yang lain."

P : "Ada berapa jenis bansos yang Ibu ketahui?"

N : "PKH, BPNT itu sembako, terus apa yang 300rb itu lupa namanya yang satu bulan sekali kalo ga salah."

P : "Apa selama satu tahun orangnya sama atau bergantian Ibu?"

N : "Ya engga si tergantung, itu berjalan satu tahun tapi kalo misalnya udah satu tahun itu bergantian diliat lagi siapa yang sekiranya layak nanti diusulkan."

P : "Kalau dari desa bantuannya ada apa saja Bu?"

N : "Ada bansos dari desa juga itu posyandu (PMT, pemberian makanan tambahan) itu ada untuk lansia dan balita, yang menerima itu orang-orang yang terdaftar ikut posyandu. Ada posbindu juga itu untuk ibu-ibu dari usia 15 tahun keatas."

P : "Kalau bantuan lain selain posyandu ada ga?"

N : "Kalau pas covid itu banyak."

P : "Kriterianya bagaimana yang layak menerima itu?"

N : "Yang dapet itu kalo belum nerima bantuan tetap dari PKH atau sembako, kaya saya ini kan janda nah selama covid belum dapet bantuan apapun. Kalau PKH itu kan tetap dari 2014 nah yang belum menerima kebanyakan iri, untungnya disini kalo merasa mandiri graduasi tapi meskipun udah tandatangan materai tetap bisa bantuannya keluar lo dari pusat."

P : "Kalau begitu kemungkinan ada yang cemburu minta untuk diusulkan pasti ya Bu, tapi lama belum menerima/turun dari pusat terus bagaimana solusinya Bu?"

N : "Ada pasti tapi saya sebagai kader saya kasih tahu kalau mengusulkan nama-nama penerima bansos itu butuh proses, dulu jamannya Mas Dimas (pendamping PKH) kalau minta pertimbangan warga yang masuk kriteria saya ngasihnya juga kira-kira dari pertimbangan kondisi keluarganya gimana, yang penting kalau pada minta dan protes di iya kan saja dulu. Saya jadi kader itu diprotes terus lo mba."

P : "Berarti yang mengusulkan dan mengamati di rt ini itu ibu?"

N : “Di setiap lingkungan kan ada masing-masing kelompok dan kader PKH kalau disini iya saya, saya masih jadi kader PKH.”

P : “Kondisi ekonomi masyarakat desa, mayoritas pekerjaannya sebagai apa?”

N : “orang sini (bapak-bapak) mayoritas buruh, tani, kalau ibu-ibu banyak yang kerja sebagai asisten rumah tangga berangkat pagi jam 7 pulang siang jam 2 lebih mending seperti itu.”

P : “Selain dari bansos itu kalo upaya kepala desa untuk meningkatkan ekonomi desa seperti apa?”

N : “Di pertanian si ubi marinem, kacang pokoknya pertanian lah itu. Saya kurang paham.”

P : “Ibu pahamnya soal bansos aja nggih. Kalau begitu saya ingin tahu jenis bansos kan banyak apakah berkemungkinan tiap 1 orang bisa doble menerima bansos?”

N : “Engga ada si, misalkan kaya dulu covid satu KK dua orang menerima contoh saya dan suami dapet nah itu dikasih tau 1 KK ga boleh nerima semua, harus dikasih yang belum dapet.”

P : “Kalau dapet dri PKH terus ga dapet dari desa?”

N : “iya engga.”

P : “Inovasi kades yang paling terlihat apa?”

N : “Pembangunan jalan, aspal jalur atas-petambakan, kalau sini kan rawan longsor nah itu bikin penahan longsor terus jalan jalan desa, pinggir sungai juga diaspal soalnya sini kan pinggir sungai buat jalan umum hampir merata pembangunannya. terus pengairan juga, setiap rw dibuatkan penampungan itu untuk kebutuhan rumah tangga, dari penampungan itu tiap rumah ngairin sendiri pake peralon. itu karna inisiatif juga dari usulan masyarakat karena dulu sini punya dari swadaya masyarakat atau peralonnya sering ilang kalau banjir jadi waktu kumpulan usul. pertemuannya waktu musrenbangdes, PKK, rt, kadesnya termasuknya aktif si .”

P : “Kalau kumpulan soal pembahasan KPM sering engga?”

N : “engga si, paling engga di setiap tahun si.”

P : “Boleh saya tahu proses pengusulan nama-nama warga sebelum menerima bansos dari pusat itu bagaimana tahap-tahapnya?”

N : “tiap rt mengusulkan terus dilihat orangnya mampu atau engga, intinya kalau saya pokoknya ngusulin aja. kan bisa jadi rumahnya bagus tapi biasa aja ekonominya atau rumahnya jelek tapi sawahnya banyak yang tahu kan itu kadus karena kadus sering kesini narik pajak jadi ya pertimbangan kadus juga. musrenbang yang dateng penerima undangan, itu biasanya rt, kader, tokoh masyarakat, orang biasa bisa dateng karena biasanya satu rt ada 1 atau 2 orang untuk mewakili.”

P : “Kalau begitu yang diusulkan belum tentu masuk ke DTKS ya Bu?”

N : “iya betul, karena banyak ni yang ngusulin langsung ke bu kades cerita kondisinya terus minta bantuan tapi kan belum tentu lolos DTKS jadi paling dapet yang dari desa biar ga saling iri atau ga BPJS bantuannya yang KIS. kaya kemarin BPJS dateng terus infonya di share ke kader nanti

kita kasih tau ke warga. bikin apa disini juga ga dipersulit, kalau ada apa-apa juga di umumkan syarat dan segala macam diberi tahu. Saya malah kadang di wa sama kadusnya suruh ngumpulin atau ambilin ini buat rt situ"

P : "Kalau boleh tau Ibu termasuk pendukung kades di 2017 atau netral?"

N : "Saya si milih Ibu."

P : "alasannya milih karena apa Bu?"

N : "alasan saya milih karena saya kader biar komunikasinya gampang, terus sama-sama perempuan lebih enak ngomongnya. Kaya kemarin ada lomba gitu dikumpulin diajak makan terus kalau minta apa misalnya seragam gitu ya ngomongnya lebih enak coba kalo ke bapak-bapak."

P : "Orangnya ramah ya kadesnya."

N : "Iya orangnya lucu lah."

P : "Ibu masih jadi ketua kelompok PKH?"

N : "saya dulu ketua kelompok pas Mas dimas tapi sekarang bukan ketua lagi."

P : "Kalo mengingat 2017 menjelang pilkades itu bagaimana cara kades berkampanye ke masyarakat Bu?"

N : "iya keliling terus kalau ada pengajian itu dateng iya sambil minta dukungannya. kalau disini kan setiap bulan ada pengajian nah itu diundang beliau dateng. Karena kan setiap rw ada pengajian."

P : "Apa Ibu paham daerah mana saja yang menjadi basis timsesnya, atau di wilayah rt sini siapa nggih yang bisa saya wawancara dari perwakilan timses."

N : "saya gatau timsesnya di daerah mana, saya bukan timses rt sini saya ga paham juga karena ga keliatan orang-orangnya."

P : "Kalau yang ibu pahami atau pernah dengar soal kelebihan atau keuntungan masyarakat yang mendukung kades apakah ada?"

N : "Itu sepertinya kalo minta dibantu cari pekerjaan ya sepertinya dapet, tapi rw sini engga lah kayanya karena jauh tiap beda rw ya beda lagi."

P : "Ibu putranya berapa? Apa masih ada yang sekolah?"

N : "Ada yang masih SD."

P : "Masih menerima PKH Bu?"

N : "masih."

P : "Kalo sembakonya masih juga Bu?"

N : "Alhamdulillah masih."

P : "Prosesnya lancar Bu?"

N : "Lancar tapi tahun 2022 ini belum cair."

P : "Kalo saya denger waktu covid itu jumlah penerima bansos bertambah ya Bu?"

N : "Iya waktu covid itu banyak."

P : "Tanpa diseleksi itu Bu?"

N : "Iya diseleksi tapi gatau juga saya si, karena pas ngambil di desa itu banyak orang-orang baru."

P : "Barangkali itu memang sebelumnya sudah diusulkan waktu musren mungkin."

N : “Iya mungkin ya. Soalnya kadang ada yang data bantuannya keluar namanya ada di list tapi waktu mau ambil ternyata bukunya kosong, itu kan datanya dari bank jadi desa dapet data dari bank terus desa ngeshare datanya ke rt atau kader buat minta tolong diberitahukan ke yang bersangkutan karena namanya masuk didata. Ambilnya di desa nanti orang BRI yang datang ”

P : “Ada yang bukunya itu kosong maksudnya bagaimana Bu? Terus tindaklanjutnya seperti apa?”

N : “Ada si yang namanya termasuk didata tapi pas mau ambil bantuan buku tabungannya masih kosong belum ada uangnya, ada yang bantuanya udah keluar tapi bukunya belum ada. Yang bermasalah seperti itu suruh bawa bukti bukunya ke bank nanti dibantu pihak bank.”

P : “Kalo dari pihak desanya membantu atau bagaimana?”

N : “Ya suruh datang ke bank nanya sendiri si, suka pada protes terus iri ngadu ke kades yang bukunya belum ada malah dapet ini itu segala macem lah ya namanya orang.”

P : “Soal bansos memang sensitive ya Bu.”

N : “lah ya iya semua orang pinginnya dapet. Rame kalo masalah bantuan.”

P : “Tapi kan semua orang dapet ya Bu?”

N : “Iya si dapet, sini kan misalnya dapet PKH atau ga dapet BPNT, ya ada yang dapet RTLH itu malah untung rumahnya jadi bagus ya lebih banyak juga kan itungannya. Kan itu ada yang dari desa, dari provinsi apa pusat gitu katanya. Sini Alhamdulillah pada dapet.”

P : “Itu mengusulkan sendiri atau lewat RT Bu?”

N : “Ya itu kan kadusnya yang keliling sambil diliat mana yang belum layak, kalau RTLH dari desa ya orang desa yang survey kalo provinsi ya orang provinsi yang survey sambil dilihat layak tidak.”

P : “RTLH yang dari provinsi itu kan pasti butuh pengajuan ya Bu apa alurnya sama melalui RT?”

N : “Pertama RT yang mengusulkan, kan kalo pertemuan dikasih tau ini misal ada kuota RTLH dari provinsi terus nanti dipilih RW mana aja yang dipilih dan benar-benar layak.”

P : “Ehmm gitu ya Bu, sepertinya udah cukup. Soal strategi kampanye aja sepertinya yang masih kurang dari saya, sulit karena kampanyenya tidak terlihat ya Bu?”

N : “Iya sih, paling taunya dari pengajian itu. Disini kan kebanyakan dari pengajian tiap minggu ada pengajian si, sini kan tiap Rt pengajian.”

P : “Atau ada ini barangkali nyebar sticker, ada baliho dsb, rame juga engga Bu?”

N : “iya itu kalo udah jelas mau maju ada bagi-bagi sticker dsb gitu.”

P : “Pemilihan 2017 itu lawannya berapa orang Bu?”

N : “Lawannya empat itu seinget saya, ada kadus 1, orang Tambakan 1, Bp J 1, Bp I.”

P : “Keluarga Kades memang terkenal ya Bu disini?”

N : “Iya kalo disini terkenal, bapaknya udah alm tapi bisnis daging keluarganya masih dari kecilnya saya.”

Nama : (Insial) B
Ket : Warga desa
Tempat : Rumah narasumber
Tanggal : 29 Maret 2023

P : “Menurut Ibu kades orang yang seperti apa?”
N : “Orangnya baik.”
P : “Kalo digambarkan beliau jadi sosok pemimpin yang seperti apa?”
N : “Gimana ya intinya baik lah hehe.”
P : “Orangnya merakyat engga Bu?”
N : “Iya merakyat.”
P : “Sering kunjungan ke masyarakat tidak Bu?”
N : “Iya, dulu biasanya kalo ada sesuatu atau misal masang bantuan apa gitu ya kesini.”
P : “Masang bantuan apa Bu misalnya?”
N : “Itu misal bantuan pembangunan jalan gitu, orangnya ramah.”
P : “Yang ibu ketahui bantuan apa yang diberikan kades di wilayah RT ini?”
N : “Jalan iya jalan, terus ada jamban sehat udah ada. Tapi itu kan buat rumah yang belum ada jambannya. RTLH itu semacam bedah rumah gitu adik saya itu juga dapat.”
P : “Bentuk bantuan RTLH itu apa Ibu, material bangunan atau nominal uang sekian untuk pembangunan?”
N : “Itu material, sini tinggal ngelola aja tukang cari sendiri.”
P : “Kalo selain adiknya Ibu apa ada lagi yang menerima disekitar sini?”
N : “Ada itu saudara saya juga dapet.”
P : “Kalo soal bansos ini PKH, sembako, atau covid itu apakah cukup banyak? Ibu termasuk penerima salah satunya bukan?”
N : “Iya ada disini lumayan lah, saya yang non-pkh.”
P : “Sampai sekarang proses penyalurannya masih lancar atau bagaimana Bu?”
N : “Iya itu lancar, tapi Desember Januari Februari terus di bulan Maret baru menerima.”
P : “Ibu menerima dari tahun berapa?”
N : “Lah udah lama dari rumah ini masih jelek.”
P : “Apa dari sebelum Kades yang sekarang Ibu sudah menerima?”
N : “Engga si semenjak kades yang sekarang itu baru menerima.”
P : “Kalo sebelum kades yang sekarang distribusi bansosnya bagaimana apakah lancar juga?”
N : “Engga tahu saya kalo itu. Saya itu pertama tahu tiba-tiba dikabari Pak RT suruh ke balai desa katanya mau dapet bansos sembako.”
P : “Waktu Ibu menerima ini apa masih ada anak yang bersekolah?”
N : “Kebetulan anak saya sudah lulus semua.”
P : “Menurut Ibu melihat pembagian sembako di desa ini apakah sudah terbilang adil dan merata?”

N : “Iya merata, ada bansos PKH, non-PKH, dari desa juga banyak jadi ya hampir semua menerima.”

P : “Kalo boleh tau kondisi ekonomi masyarakat disini seperti apa Bu apakah berkecukupan atau sebaliknya?”

N : “Iya disini lumayan lah, kalo misalnya ada yang buat apa makanan bubur misalnya tetangga ikut suruh bantu-bantu ya jadi tambahan buat ibu rumah tangga. Karena kalo mengandalkan bansos aja kan ga mungkin bisa buat makan sehari-hari lah.”

P : “Saya mendapatkan informasi juga Bu kalo warga desa sini masih banyak yang belum bekerja jadi angka penganggurannya cukup tinggi, menurut pengamatannya ibu faktornya karena apa? Kalo tingkat pendidikan apa itu berdampak?”

N : “Iya bisa, kaya saya lulusan sd jadi engga bisa apa-apa paling kerja ikut orang. Kalo di RT 03 sini si engga banyak. Kalo suami saya itu merantau tapi dari dulu sejak anak kecil, katanya susah kalo mau jualan disini takut ga berkembang.”

P : “Kalo tetangga-tetangga ibu bapak rumah tangganya mayoritas kerjanya apa Bu? Apa masih banyak yang bertani?”

N : “Iya bertani punya sendiri, buruh tani, dagang juga ada si.”

P : “Upayanya kades menurut Ibu untuk membant ekonomi warga disini selain bansos apakah ada?”

N : “Itu bantuan untuk yang pedagang itu ada, dikasih tau kalo yang berdagang bisa dibantu.”

P : “Bapak termasuk yang menerima bansos itu mboten Bu? Kalo boleh tau nominalnya apa lebih besar dari bansos sembako?”

N : “Iya, nominalnya itu satu juta dua ratus kalo engga salah menerimanya sekali.”

P : “Selain bapak apa banyak yang menerima bansos tersebut?”

N : “Ya engga si ada yang nerima ada yang engga.”

P : “Waktu itu proses seleksinya bagaimana Bu? Apa secara mandiri usul ke desa atau diusulkan dari RT?”

N : “Jadi, ada informasi katanya kalo pedagang mau dikasih bantuan dari pemerintah. Terus dimintai KTP sama apa-apa syaratnya. Saya si ya udah nerima ya syukur engga ya sudah.”

P : “Orang yang memberi informasi itu siapa Bu? Apa ada pengumuman atau dari RT?”

N : “Saya dapet dari orang-orang, yang penting itu saya setor syarat barangkali rezeki nah Alhamdulillahnya ternyata rezeki. Lumayan banget itu waktu covid karena suami saya engga bisa pulang karena PPKM terus jualan sepi.”

P : “Kalo kembali ke masa menjelang pemilihan kades 2017 kemarin, apakah ibu mengamati mayoritas warga di wilayah ini mendukung kandidat mana?”

N : “Ya yang mendukung M ada yang I juga ada.”

P : “Suaranya terpecah mayoritas diantara pendukung M dan I saja ya Bu kalo berdasarkan cerita yang lain pun begitu? Kalo boleh tau dua orang ini memang tokoh di desa atau berperan cukup banyak atau seperti apa?”

N : “Iya si, dua duanya orangnya baik si.”

P : “Ibu kurang begitu mengikuti politik di desa nggih? Atau netral saja?”

N : “Iya saya dikasih tau orangnya gini-gini cukup baik ya sudah pilih, tapi saya engga aktif ngikutin politik biasa aja lah. Waktu kampanye aja ga ada timses yang masuk kerumah saya.

Nama : (Inisial) A
Ket : Warga Desa
Tempat : Rumah Narasumber
Hari/tgl : 29 Maret 2023

P : “Menurut Ibu distribusi bansos di desa sudah merata belum? Apakah penerimanya sejauh ini layak bila Anda amati?”
N : “Kurang tahu saya soalnya saya ga menerima.”
P : “Tapi sebetulnya Ibu ada sedikit berharap menerima bansos tidak? Apakah sudah mengusahakan sejauh ini usul ke desa maupun RT?”
N : “Sebetulnya iya karena anak saya masih ada yang sekolah. Kalo usul mungkin RT-nya yang sudah, katanya nama saya sudah masuk di DTKS cuma engga keluar bantuan PKH atau sembako. Waktu itu pernah menerima tapi yang dari provinsi itu.”
P : “Selama periode kades M sepuluh tahun terakhir ini, Anda punya kedekatan atau hubungan yang baik dengan beliau?”
N : “Kenal biasa aja sih.”
P : “Kalau digambarkan seperti apa kades M sebagai sosok pemimpin?”
N : “Baik menurut saya.”
P : “Mungkin Anda bisa menceritakan kelebihan dan kekurangan kades selama menjabat 10 tahun terakhir ini.”
N : “Kekurangannya engga ada ya, karena menurut saya baik aja ya udah baik.”
P : “Anda cukup kenal baik dengan kades M, nah dari situ apakah Anda pernah mencoba mengusulkan langsung kepada beliau agar Anda diberi bansos PKH?”
N : “Belum pernah.”
P : “Kalau boleh saya tahu Anda dulu tim pendukung kandidat siapa ketika pemilihan kepala desa?”
N : “Saya dulu milih M, satu keluarga.”
P : “Apa Anda dan keluarga ditarik menjadi tim sukses?”
N : “Engga si.”
P : “Mohon maaf pekerjaan Ibu dan suami, *nopo nggih?*”
N : “Saya IRT, kalau suami tukang kayu.”
P : “Kalau ini terkait pelayanan di kantor desa sejauh ibu mengurus sesuatu di kantor desa sulit atau dipermudah?”
N : “Mudah sepertinya, soalnya saya dirumah terus.”
P : “Saya dengar kabar katanya beliau berencana mencalonkan diri lagi untuk periode 2024, kalau misalnya betul apa Ibu berkenan memilih kembali?”
N : “Iya Insyaallah.”
P : “Dibandingkan yang lain pasti Anda punya alasan, alasan apa untuk berkenan milih lagi?”
N : “Hehehe apa si ya, ya gapapa kan mba. Karena baik.”

Lampiran 2. Foto (Dokumentasi Penelitian)

DINSOSPPPA KABUPATEN BANJARNEGARA

Wawancara kepada Bapak Maulvi Dimas selaku Koordinator Kabupaten Bidang PKH, yang berlokasi di Ruang Kerja Bidang PKH Kantor Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (DINSOSPPA) Banjarnegara.

(25 Januari 2023)

Lampiran 3. Bukti Riset

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Letnan Karjono No. 193 Telp./Fax : (0286) 591892
BANJARNEGARA 53412

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460/134/DINSOS PPPA/2023

Dasar : Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Nomor 144/UN7.F7/PP/I/2023 Tanggal 05 Januari 2023 Perihal Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Aditya Agus Satria, M.Ec.Dev., MA, Ak, CA
NIP	: 19800903 200501 1 008
Pangkat	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Sekretaris Dinas
Unit Kerja	: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Hasna Nur Rachmawati
NIM	: 14010119140147
Program Studi	: S1-Ilmu Pemerintahan

Telah benar-benar melaksanakan Penelitian dengan judul *"Kemenangan Petahana Melalui Strategi Politik Pork Barrel dalam Pemilihan Kepala Desa Ampelsari Tahun 2017"* di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara pada Tanggal 25 Januari 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 31 Agustus 2023

Ats. Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Banjarnegara
Sekretaris Dinas Sosial PPPA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINSOS PPPA

Aditya Agus Satria, M.Ec.Dev., MA, Ak, CA
NIP. 19800903 200501 1 008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

05 JAN 2023

Nomor : KA/UN7.F7/PP/1/2023
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala DINSOSPPPA
di Jl Letnan Karjono, Parakancanggah, Kec. Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada staff dan karyawan DINSOSPPPA.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

N a m a	: Hasna Nur Rachmawati
NIM	: 14010119140147
Judul	: "Kemenangan Petahana Melalui Strategi Politik Pork Barrel dalam Pemilihan Kepala Desa Ampelsari Tahun 2017"
Alamat Rumah	: Jl. Kh. Ahmad Dahlan Rt 02 Rw 06, Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Alamat email	: hasnanrahmawati@gmail.com
No. HP	: 085704644626

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Dekan,

Dr. Hardi Warsono, M.T.
NIP 196408271990011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

Nomor : 106/UN7.F7/PP/I/2023 04 JAN 2023
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Ampelsaari
di Jl Raya Tirtasari Desa Ampelsari
Kabupaten Banjarnegara

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada perangkat Pemerintahan Desa Ampelsari.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

N a m a	: Hasna Nur Rachmawati
NIM	: 14010119140147
Judul	: "Strategi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Ampelsari Tahun 2017"
Alamat Rumah	: Jl. Kh. Ahmad Dahlan Rt 02 Rw 06, Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Alamat email	: hasnanrahmawati@gmail.com
No. HP	: 085704644626

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Dekan,

Dr. Hardi Warsono, M.T.
NIP 196408271990011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

Nomor : 203 /UN7.F7/PP/I/2023
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

06 JAN 2023

Yth. Ketua RT/RW
di Desa Ampelsari
Kab Banjarnegara

Dalam rangka untuk bahan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Diponegoro Semarang.
Mohon sekiranya dapat diberikan izin kepada mahasiswa FISIP dapat melaksanakan wawancara untuk memperoleh data di Desa Ampelsari tentang "Strategi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Ampelsari Tahun 2017"

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: Hasna Nur Rachmawati
Nomor Induk Mahasiswa	: 14010119140147
Tempat /Tgl Lahir	: Banjarnegara, 26 Maret 2001
Departemen /Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Alamat Rumah	: Jl KH Ahmad Dahlan Rt 02 Rw 06
Alamat email	: hasnanrahmawati@gmail.com
Nomor HP	: 085704644626

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Dekan,

Dr. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001

Lampiran 4. Dokumen Relevan

(Lampiran Berita Acara Pemilihan Suara Kepala Desa Ampelsari Tahun 2017 print out file yang diperoleh dari tokoh masyarakat)

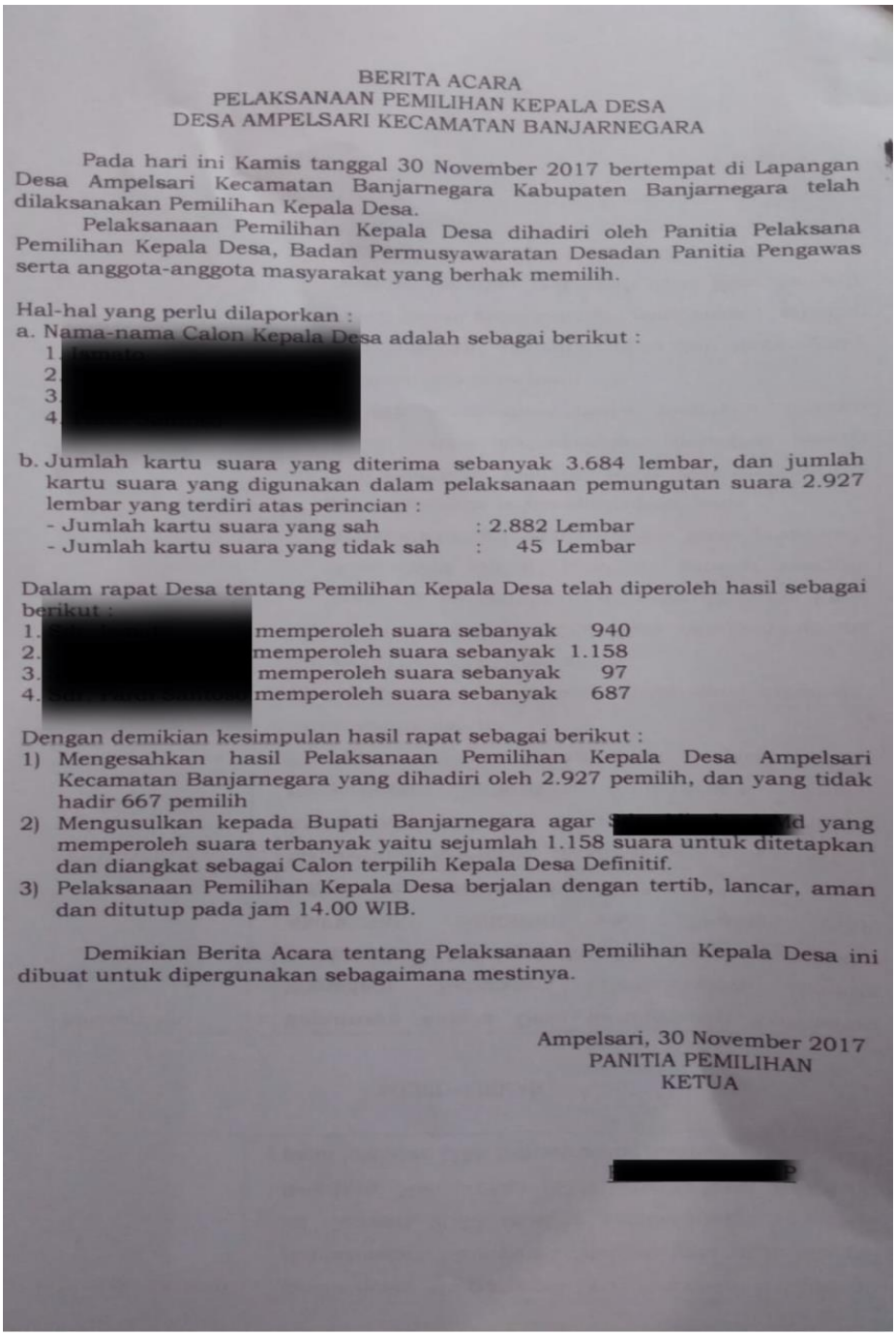

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA AMPELSARI KECAMATAN BANJARNEGARA

Pada hari ini Kamis tanggal 30 November 2017 bertempat di Lapangan Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desadan Panitia Pengawas serta anggota-anggota masyarakat yang berhak memilih.

Hal-hal yang perlu dilaporkan :

a. Nama-nama Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
   1. [redacted]
   2.
   3.
   4.

b. Jumlah kartu suara yang diterima sebanyak 3.684 lembar, dan jumlah kartu suara yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara 2.927 lembar yang terdiri atas perincian :
   - Jumlah kartu suara yang sah : 2.882 Lembar
   - Jumlah kartu suara yang tidak sah : 45 Lembar

Dalam rapat Desa tentang Pemilihan Kepala Desa telah diperoleh hasil sebagai berikut :

1. [redacted] memperoleh suara sebanyak 940
2. [redacted] memperoleh suara sebanyak 1.158
3. [redacted] memperoleh suara sebanyak 97
4. [redacted] memperoleh suara sebanyak 687

Dengan demikian kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1) Mengesahkan hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara yang dihadiri oleh 2.927 pemilih, dan yang tidak hadir 667 pemilih
2) Mengusulkan kepada Bupati Banjarnegara agar S[redacted]d yang memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah 1.158 suara untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Calon terpilih Kepala Desa Definitif.
3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan ditutup pada jam 14.00 WIB.

Demikian Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ampelsari, 30 November 2017
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

[redacted]